



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2017-2022

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
TAHUN ANGGARAN 2021**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa karena perkenaannyalah sehingga kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan kegiatan Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Strategis Tahun 2017 - 2022.

Dokumen rencana strategis merupakan dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang digunakan untuk mengontrol setiap aktivitas kegiatan baik sedang berlangsung maupun yang akan datang, sebagai dokumen acuan untuk mengukur *outcome* (hasil) yang harus dicapai, dijadikan sebagai sarana meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.

Penyusunan Perubahan dokumen rencana strategis Tahun 2017-2022 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat disusun oleh Tim Penyusun dengan SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 660/ /SK/XII/2020/DLHD Tentang Pembentukan Tim penyusun Rancangan Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Daerah.

Akhirnya pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan ini serta memberikan data-data yang dibutuhkan dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022 dapat tersusun. Semoga dokumen Perubahan Rencana Strategis ini dapat dilaksanakan dengan baik oleh semua pihak.

Mamuju, Januari 2021

Kepala DLH Prov. Sulbar,



A. ACO TAKDIR, S.Sos.M.Pd

NIP. 19670702 199103 1 011

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
BAB I. Pendahuluan.....	I-1
1.1. Latarbelakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-5
1.3. Maksud dan Tujuan.....	I-8
1.4. Sistematika Penulisan.....	I-9
BAB II. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	II-1
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur OPD	II-1
2.2. Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup Provinsi	
Sulawesi Barat	II-18
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi ...	
Sulawesi Barat	II-22
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan....	
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat	II-26
BAB III. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	III-1
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan	
Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	III-1
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan ..	
Wakil Kepala Daerah	III-3
3.3. Telaahan Renstra K/L	III-6
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian	
Lingkungan Hidup Strategis	III-8
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.....	III-13
BAB IV. Tujuan dan Sasaran	IV-1
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD.....	IV-1
BAB V. Strategi dan Arah Kebijakan.....	V-1
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan	V-1
BAB VI. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan.....	VI-1
6.1. Rencana Program Kegiatan.....	VI-1
BAB VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	VI-1
BAB VIII. Penutup	VIII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai.....	II-19
Tabel 2.2. Daftar Aset Dinas Lingkungan Hidup	
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 s.d 2018.....	II-20
Tabel 2.3. Indeks Kualitas Air Sulawesi Barat.....	II-23
Tabel 2.4. Indeks Kualitas Udara Sulawesi Barat	II-23
Tabel 2.5. Indeks Tutupan Lahan Sulawesi Barat.....	II-23
Tabel 2.6. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	
Dinas Lingkungan Hidup Periode 2012-2016.....	II-24
Provinsi Sulawesi Barat	II-24
Tabel 2.7. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan	
Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup	
Periode 2012-2016.....	
Provinsi Sulawesi Barat	II-25
Tabel 3.1. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas	
Dan Sasaran Pembangunan Daerah	III-1
Tabel 3.2. Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	
Provinsi Sulawesi Barat Berdasarkan Telaahan RTRW..	
Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong.....	
Keberhasilan Penanganannya	III-9
Tabel 3.3. Data Status Pencemaran Air Sungai di.....	
Prov. Sulawesi Barat.....	III-15
Tabel 3.4. Jenis Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah	III-18
Tabel 3.5. Luas Lahan Kritis di dalam dan di luar Kawasan Hutan ..	III-20
Tabel 3.6. Kondisi Hutan Mangrove Provinsi Sulawesi Barat	III-22
Tabel 3.7. Kondisi Terumbu Karang di Sulawesi Barat.....	III-23
Tabel 3.8. Jumlah Sekolah Peraih Penghargaan Adiwiyata	
Menurut Kabupaten	III-25
Tabel 3.9. Jumlah Sekolah Peraih Penghargaan.....	
Adiwiyata Menurut Kategori	III-26
Tabel 4.1. Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Pelayanan	
Perangkat Daerah.....	IV-1
Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	V-1
Tabel 6.1. Matriks Rencana Program,	
Kegiatan dan Pendanaan Indikatif	VI-2
Tabel 6.2. Matriks Perubahan Rencana Program, Kegiatan	
dan Pendanaan Indikatif	VI-
Tabel 7.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu	
Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	VII-2

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Bagan Alur Penyusunan Renstra SKPD Provinsi	I-3
Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup	
Provinsi Sulawesi Barat	II-18
Gambar 2.2. Jumlah PNS Menurut Pangkat/Golongan	II-19
Gambar 2.3. Jumlah PNS Berdasarkan Pendidikan	II-19
Gambar 2.2. Gambaran Anggaran dan Realisasi Belanja	
Langsung Tahun 2012-2016	II-26
Gambar 2.4. Gambaran Anggaran dan Realisasi Belanja	
Tidak Langsung Tahun 2012-2016	II-31
Gambar 3.1. Dokumentasi Pencemaran Lingkungan	III-17
Gambar 3.2. Prakiraan Timbulan Sampah.....	III-19

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana strategis (Rentsra OPD) merupakan dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang digunakan untuk mengontrol setiap aktivitas kegiatan baik sedang berlangsung maupun yang akan datang, sebagai dokumen acuan untuk mengukur *outcome* (hasil) yang harus dicapai, dijadikan sebagai sarana meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas. Dokumen renstra memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan indikatif dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Paradigma Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 272 ayat (1) Perangkat daerah menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah (RPJMD). Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 272 ayat (1), (2) dan (3) menyatakan bahwa Perangkat daerah menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman kepada RPJMD. Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rencana

strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dinyatakan bahwa lingkungan hidup merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, dimana masing-masing urusan pemerintahan yang dimaksud diwadahi dalam bentuk dinas provinsi. Oleh karena itu berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah pada pasal 5 bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah antara lain Dinas Daerah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 tahun 2016 tentang kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja dinas daerah Provinsi Sulawesi Barat, salah satunya adalah Dinas Lingkungan Hidup yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan perumusan, kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pemantauan dan evaluasi urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup meliputi bidang penataan dan penataan PPLH, Bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas dan Bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Proses penyusunan Dokumen Renstra Tahun 2017 – 2022 oleh Dinas Lingkungan Hidup selaku instansi Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka

Pada proses perubahan Renstra juga melalui beberapa tahapan seperti pada bagan alur penyusunan Renstra OPD. Secara lebih rinci proses penyusunan Renstra dimaksud meliputi tahapan : (a) Persiapan penyusunan Renstra, yang diawali dengan adanya evaluasi terhadap indikator capaian Renstra (2017-2018); (b) Penyusunan rancangan Awal Renstra; (c) Penyusunan rancangan akhir renstra; dan (d) Penetapan Renstra. Diharapkan Perubahan RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2017 –2022 dapat disusun secara realistis sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan yang ada dan indikator capaian dapat tercapai untuk mendukung pembangunan daerah khususnya dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan. Dalam penyusunan Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2022 dibentuk Tim Penyusun Perubahan RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat melalui Surat Keputusan plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat tanggal Mei 2019, Nomor : 660/ /SK/V/2019/DLHD tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 - 2022.

Pada proses penyusunan Rancangan Perubahan Renstra mencakup antara lain : pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah, review Renstra K/L (Kementerian/Lembaga) dan Provinsi, penelaahan dan analisis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), perumusan isu strategis serta perumusan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) Tahun. Dokumen-dokumen perencanaan merupakan bagian sistem perencanaan pembangunan yang sistematis dan terpadu sehingga seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Dokumen renstra dirumuskan dalam rangka mewujudkan perencanaan dan pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan RPJMD. Demikian halnya dengan Dokumen Renstra sebagai salah satu

komponen perencanaan pembangunan daerah memiliki keterkaitan dari segi visi dan misi, program, kegiatan, termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya. Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Perubahan Renstra yang telah disusun selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan dokumen jangka pendek dan tahunan yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 – 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 51);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 – 2022.
16. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Barat Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 Nomor 4; Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Barat nomor 69);

17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 79);
18. Peraturan Gubernur No 45 tahun 2016 tentang kedudukan tugas dan fungsi susunan organisasi dan tata kerja dinas daerah provinsi Sulawesi Barat (Berita daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 45).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 – 2022 adalah untuk memberikan landasan kebijakan strategi lima tahunan di bidang lingkungan hidup dalam kerangka pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat pada periode 2017 – 2022 khususnya untuk Periode 5 dan 6 (Tahun 2021 dan 2022), menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun serta menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan.

Adapun tujuan dalam penyusunan Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 – 2022 adalah untuk menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang strategis di bidang lingkungan hidup selama lima tahun melalui sumber pembiayaan APBD dengan penjabaran sebagai berikut :

1. Sinkronisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Barat serta acuan untuk mendukung pembangunan daerah;
2. Menyediakan bahan serta pedoman untuk penyusunan Rencana Kinerja (Rencana Kerja Tahunan) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi

- Sulawesi Barat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun serta acuan penyusunan Renja Kerja (RENJA) tahunan Dinas Lingkungan Hidup;
3. Acuan dan dasar didalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup;
 4. Meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi;
 5. Sebagai dokumen kontrak kinerja antara Gubernur dengan Dinas Lingkungan Hidup.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 – 2022, adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada Bab ini menguraikan latarbelakang, landasan hukum, maksud, tujuan, kedudukan dan peranan Renstra dalam Perencanaan Daerah

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Pada Bab ini menguraikan tugas, fungsi da struktur organisasi serta sumber daya OPD, Kinerja Pelayanan OPD, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada Bab ini membahas tentang proses diperoleh isu-isu strategis melalui metode pembobotan yang mencakup indentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan OPD, telaahan-telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga, Telaahan Tata Ruang Wilayah dan Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Pada Bab ini menjelaskan tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulawesi Barat Tahun 2017 – 2022.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada Bab ini menjelaskan strategi dan arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulawesi Barat Tahun 2017 – 2022.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada Bab ini berisi tentang Rencana Program-program kegiatan serta pendanaan peningkatan kualitas lingkungan hidup sesuai dengan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menguraikan tentang kinerja penyelenggaraan bidang urusan Lingkungan Hidup dan pencapaian program dalam pelaksanaan kegiatan yang mengacu pada fungsi dan sasaran RPJMD Tahun 2017 – 2022.

BAB VIII. PENUTUP

Bab ini berisi Penutup Dokumen Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

2.1.1. TUGAS DAN FUNGSI

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat dibentuk sebagai realisasi pelaksanaan dari prinsip Desentralisasi kewenangan otonomi daerah, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Peraturan pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dinyatakan bahwa lingkungan merupakan salah satu urusan pemerintahahn wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, dimana masing-masing urusan pemerintah yang dimaksud diwadahi dalam bentuk dinas provinsi. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat (DLH), merupakan salah satu unsur penunjang pemerintahan provinsi di bidang Lingkungan Hidup yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah yang ditindaklanjutnya dengan adanya Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja dinas daerah Provinsi Sulawesi Barat. Dinas ini berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Sulawesi Barat.

a. Tugas

Dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat mempunyai tugas “membantu Gubernur melaksanakan perumusan, kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pemantauan dan evaluasi urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup meliputi bidang penataan dan penaatan PPLH, Bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas dan Bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup”. (Pasal 146 ayat (1) Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016)

b. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1) Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional bidang penataan dan penataan PPLH, Pengelolaan sampah, Limbah B3 dan peningkatan kapasitas, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta unit pelaksana teknis daerah;
- b. penyelenggaraan perumusan dan menetapkan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang pengelolaan lingkungan hidup;
- c. penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian pelaksanaan tugas-tugas dibidang pengelolaan lingkungan hidup; dan
- d. penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan dan kerjasama dalam rangka tugas dan fungsi dinas.

c. Uraian Tugas Dan Fungsi

Sesuai Peraturan Daerah di atas, susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris dibantu 2 (dua) sub bagian, 3 (tiga) bidang, setiap bidang masing-masing dibantu oleh 3 (tiga) kepala seksi, dan 1 (satu) UPTD Laboratorium yang terdiri dari Kepala UPTD yang dibantu oleh 1 (satu) Kasubag. TU, dengan rincian sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan perumusan, kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pemantauan dan evaluasi urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup meliputi bidang penataan dan penataan PPLH, Bidang Pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan

kapasitas dan Bidang Pengendalian Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Dalam menyelenggarakan tugasnya Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional bidang penataan dan penaatan PPLH, Pengelolaan sampah, Limbah B3 dan Peningkatan kapasitas, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta unit pelaksanaan teknis daerah.
- b. Penyelenggaraan perumusan dan menetapkan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- c. Penyelenggaraan fasilitas dan pengendalian pelaksanaan tugas-tugas dibidang pengelolaan lingkungan hidup.
- d. Penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan dan kerjasama dalam rangka tugas dan fungsi dinas

2. Sekretaris

Mempunyai tugas mengoordinir dan melaksanakan pengkajian penyusunan program dan pelaporan, pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, administrasi pengelolaan keuangan serta pengelolaan administrasi kepegawaian. Dalam pelaksanaan tugasnya sekretaris dibantu oleh 2 (dua) subbagian, yaitu :

a. Subbagian Program dan Pelaporan

Mempunyai tugas :

- 1) melaksanakan penyusunan rencana kegiatan kerja Sub Bagian program dan keuangan;
- 2) melaksanakan identifikasi, perumusan, penyusunan rencana program pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang;

- 3) melaksanakan penyusunan rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) dinas;
- 4) melaksanakan koordinasi penyusunan program perencanaan pemerintah daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- 5) melaksanakan pengumpulan dan rekapitulasi semua laporan kegiatan bulanan dinas;
- 6) melaksanakan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) dan pelaporan-pelaporan dinas lain;
- 7) melaksanakan koordinasi pengumpulan, pengolahan, analisa, dan penyajian data statistik program dan kegiatan masing-masing bidang;
- 8) melaksanakan kajian, analisa, evaluasi kinerja, dan pelaporan kemajuan program dan kegiatan masing-masing bidang;
- 9) melaksanakan penyusunan dan pengajuan rencana penggunaan anggaran;
- 10) melaksanakan penyusunan dan pengelolaan realisasi perhitungan anggaran serta pembenahan administrasi bendahara;
- 11) melaksanakan verifikasi pertanggung jawaban keuangan dinas;
- 12) melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pertanggung jawaban keuangan dinas;
- 13) melaksanakan evaluasi semua tugas-tugas bendaharawan;
- 14) melaksanakan perbendaharaan keuangan dinas;
- 15) melaksanakan penyusunan laporan pertanggung jawaban keuangan dinas;
- 16) melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan meliputi gaji pegawai, keuangan, perjalanan dinas serta hak-hak keuangan lain;
- 17) melaksanakan klarifikasi dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan/atau laporan hasil audit (LHA);
- 18) melaksanakan pengelolaan data bahan pelaporan keuangan dinas;

- 19) melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan keuangan;
- 20) melaksanakan koordinasi dan konsultasi terhadap unit kerja terkait;
- 21) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas bagian perencanaan dan keuangan; dan
- 22) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

b. Subbagian umum dan kepegawaian

Mempunyai tugas :

- 1) melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) melaksanakan pengelolaan urusan ketatusahaan dan administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, kesejahteraan pegawai dan laporan berkala;
- 3) melaksanakan pengumpulan data dalam rangka pengembangan penerapan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);
- 4) melaksanakan pengelolaan dan penyajian data kepegawaian melalui Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);
- 5) melaksanakan analisis jabatan dan analisis beban kerja pegawai;
- 6) melaksanakan pengelolaan administrasi umum, surat-surat masuk dan keluar dan mengklasifikasikan surat menurut jenisnya;
- 7) melaksanakan penyelenggaraan urusan kerumahtanggaan dinas dan rencana kebutuhan perlengkapan dinas;
- 8) melaksanakan penataan dan penyelenggaraan sistem kearsipan yang dinamis;
- 9) melaksanakan penyusunan administrasi, pengadaan, pendistribusian dan penghapusan aset, barang inventaris dan perlengkapan kerja dinas; dan
- 10) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Kepala Bidang Penataan dan Penataan PPLH

Mempunyai tugas mengoordinir, merumuskan kebijakan dan melaksanakan kegiatan perencanaan dan kajian dampak lingkungan, fasilitasi dan pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan kajian dampak lingkungan, mengoordinir merumuskan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan dan penegakan hukum lingkungan, mengoordinir merumuskan kebijakan, pengawasan dan tindaklanjut terhadap penerima izin lingkungan dan PPLH; pembinaan, pengawasan dan pembentukan petugas pengawas LH, tim koordinasi dan monitoring penegakan hokum. Dalam pelaksanaan tugasnya kepala bidang dibantu oleh 3 (tiga) seksi, yaitu :

a. Seksi perencanaan dan kajian dampak lingkungan

Mempunyai tugas :

- 1) inventarisasi data dan informasi sumber daya alam;
- 2) menyusun dokumen RPPLH;
- 3) koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
- 4) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
- 5) penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- 6) menyusun tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- 7) menyusun instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- 8) Sinkronisasi RLPLH Nasional, ulau/Kepulauan dan Ekoregion;
- 9) menyusun NSDA dan LH;
- 10) menyusun Status Lingkungan Hidup Daerah;
- 11) menyusun Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;

- 12) melakukan Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
- 13) menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi;
- 14) menyiapkan bahan Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- 15) melakukan Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
- 16) melakukan Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
- 17) melakukan Pemantauan dan evaluasi KLHS;
- 18) koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
- 19) menyiapkan bahan Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL); dan
- 20) menyusun tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
- 21) melaksanakan proses izin lingkungan;
- 22) melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Seksi pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan

Melaksanakan tugas :

- 1) menyiapkan bahan penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- 2) melakukan fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 3) menyiapkan bahan pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- 4) menyusun rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- 5) melakukan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;

- 6) melakukan penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- 7) melakukan sosialisasi tata cara pengaduan; dan
- 8) menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 9) melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Seksi penegakan hukum lingkungan

Melaksanakan tugas :

- 1) menyusun kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- 2) melakukan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- 3) melakukan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- 4) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
- 5) melakukan pembentukan tim koordinasi penegakan hukum lingkungan;
- 6) melakukan pembentukan tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum;
- 7) menyiapkan bahan dalam melaksanakan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- 8) menyiapkan bahan dalam melaksanakan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup; dan

- 9) melakukan penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu; dan
- 10) melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Kepala Bidang Pengelolaan sampah, LB3 dan Peningkatan Kapasitas

Mempunyai tugas merumuskan kebijakan, melaksanakan dan mengembangkan teknologi pengelolaan sampah, pengelolaan Limbah B3, merumuskan kebijakan, mengidentifikasi, verifikasi, validasi dan menetapkan keberadaan MHA dan Kearifan lokal terkait pengelolaan LH; mengkoordinir, melaksanakan, fasilitasi pengembangan peningkatan kapasitas, dan merumuskan kebijakan dan melaksanakan pengembangan dan penilaian pemberian penghargaan. Dalam pelaksanaan tugasnya kepala bidang dibantu oleh 3 (tiga) seksi, yaitu :

a. Seksi pengelolaan sampah

Mempunyai tugas :

- 1) menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengelolaan sampah di Provinsi;
- 2) menyiapkan bahan penetapan target pengurangan dan penanganan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setia kurun waktu tertentu;
- 3) menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Regional;
- 4) melakukan Koordinasi pengangkutan pengolahan dan pemrosesan akhir bila terjadi kondisi khusus (bencana alam/non alam atau perselisihan pengelolaan sampah antar kabupaten/kota);
- 5) menyiapkan bahan penyediaan sarpras pengolahan sampah;
- 6) menyusun perencanaan dan pembangunan TPA/TPST Regional;

- 7) melakukan penetapan stasiun peralihan antara (intermediate transfer facility) dan alat angkut untuk pengangkutan dan pengolahan sampah lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi atau atas usulan dari Kabupaten/Kota;
- 8) melakukan pengembangan teknologi pengelolaan sampah;
- 9) menyiapkan bahan dan melakukan investasi dalam usaha pengelolaan sampah; dan
- 10) melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Seksi pengelolaan limbah B3

Mempunyai tugas :

- 1) menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan);
- 2) menyiapkan bahan dan mengerjakan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
- 3) menyiapkan bahan dan mengerjakan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan lintas kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;
- 4) menyiapkan bahan dan mengerjakan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan lintas kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;
- 5) melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
- 6) menyiapkan bahan sarpras pengolahan limbah B3;
- 7) melakukan Pengembangan teknologi pengelolaan limbah B3;
- 8) menyiapkan bahan dan mengerjakan Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan limbah B3; dan
- 9) melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Seksi peningkatan kapasitas

Melaksanakan tugas :

- 1) menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 2) menyiapkan bahan identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadanaan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 3) menyiapkan bahan Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 4) melakukan komunikasi dialogis dengan MHA;
- 5) melakukan Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
- 6) menyusun data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 7) menyusun kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- 8) melakukan dan menyiapkan bahan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- 9) melakukan fasilitasi kerja sama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- 10) menyiapkan bahan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerja sama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;

- 11) menyiapkan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- 12) menyiapkan bahan pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
- 13) menyiapkan bahan pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
- 14) menyiapkan bahan pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
- 15) mengerjakan peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
- 16) mengerjakan pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
- 17) melakukan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
- 18) menyiapkan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
- 19) menyiapkan bahan dan melakukan Pengembangan jenis penghargaan LH;
- 20) menyusun kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
- 21) menyiapkan bahan penilaian dan pemberian penghargaan;
- 22) melakukan pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;
- 23) menyiapkan bahan dukungan program pemberian penghargaan tingkat nasional; dan
- 24) melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Melaksanakan tugas mengkoordinir penyusunan kebijakan, pelaksanaan pemantauan, pengawasan, pemanfaatan dan penentuan kualitas lingkungan, kriteria baku kerusakan lingkungan, konservasi keanekaragaman hayati dan sumber daya alam, pelaksanaan pengendalian, penanggulangan pencemaran, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta pengembangan sistem informasi pengelolaan database keanekaragaman hayati. Dalam pelaksanaan tugasnya kepala bidang dibantu oleh 3 (tiga) seksi, yaitu :

a. Seksi pengendalian pencemaran lingkungan

Melaksanakan tugas :

- 1) melakukan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- 2) melakukan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;
- 3) melakukan Penentuan baku mutu lingkungan;
- 4) melaksanakan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- 5) melakukan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- 6) melakukan penentuan baku mutu sumber pencemar;
- 7) menyiapkan bahan dan Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- 8) menyusun kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- 9) menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- 10) menyiapkan bahan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- 11) menyediakan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan); dan
- 12) melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Seksi pengendalian kerusakan lingkungan

Melaksanakan tugas :

- 1) menyiapkan bahan penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- 2) menyiapkan bahan dan pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;

- 3) menyiapkan bahan dan pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
- 4) mengerjakan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan; dan
- 5) melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

c. Seksi pemeliharaan lingkungan

Melaksanakan tugas :

- 1) menyiapkan bahan dan melaksanakan perlindungan sumber daya alam;
- 2) menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawetan sumber daya alam;
- 3) menyiapkan bahan dan melaksanakan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- 4) menyiapkan bahan dan melaksanakan pencadangan sumber daya alam;
- 5) menyiapkan bahan dan melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- 6) menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
- 7) menyusun konservasi keanekaragaman hayati;
- 8) menyiapkan bahan penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- 9) melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- 10) melakukan penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
- 11) menyiapkan bahan pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati; dan
- 12) melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Melaksanakan tugas : Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH), melaksanakan tugas melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan.

7. UPTD Laboratorium Lingkungan

UPTD Laboratorium lingkungan merupakan UPT Dinas Lingkungan Hidup, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional laboratorium lingkungan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup.

Dalam pelaksanaannya tugasnya UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai fungsi, antara lain :

- penyusunan program/kegiatan dibidang laboratorium lingkungan;
- penyediaan data kualitas lingkungan yang akurat dan valid yang dipergunakan untuk memonitor pencemaran lingkungan disuatu wilayah dan sebagai alat bukti penegakan hukum lingkungan;
- pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan;

UPTD Laboratorium Lingkungan terdiri dari :

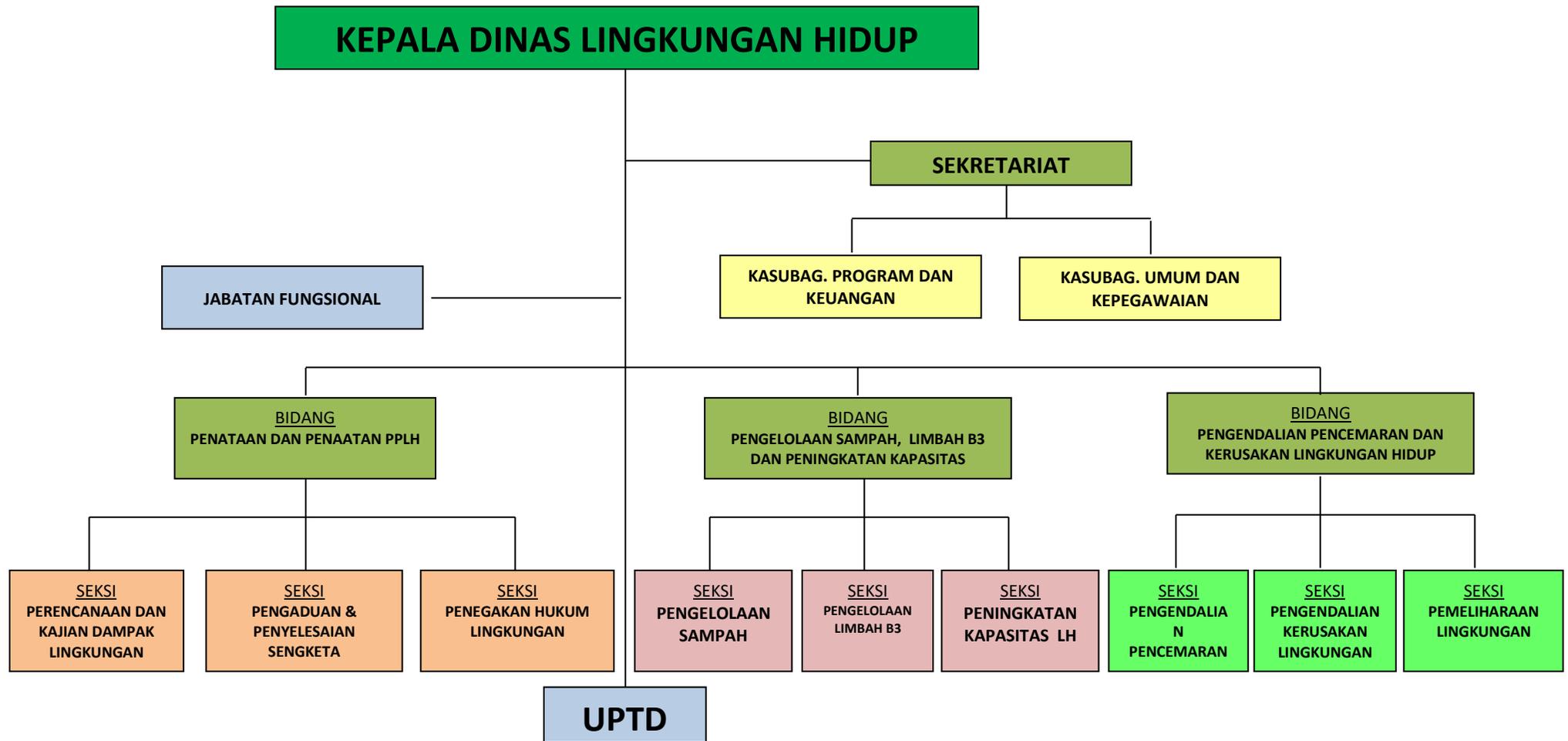
a. Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan

Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan melaksanakan tugas : mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional laboratorium lingkungan.

b. Sub. Bagian Tata Usaha UPTD Laboratorium Lingkungan

- menyiapkan bahan penyusunan rencana program, pengendalian dan pelaporan UPTD;
- menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi UPTD;

- menyiapkan bahan pengelolaan administrasi keuangan UPTD;
- menyiapkan bahan penyusunan program kerja UPTD;
- menyiapkan bahan pengelolaan administrasi ASN UPTD;
- menyiapkan bahan pengelolaan tata usaha, meliputi naskah dinas dan kearsipan, urusan rumah tangga serta perlengkapan UPTD;
- menyiapkan bahan penyusunan telaahan staf; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.



Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat

2.2. Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat

Kinerja suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh dukungan sumber daya yang dimilikinya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat didukung oleh berbagai sumber daya, antara lain sumber daya manusia dan sarana prasarana.

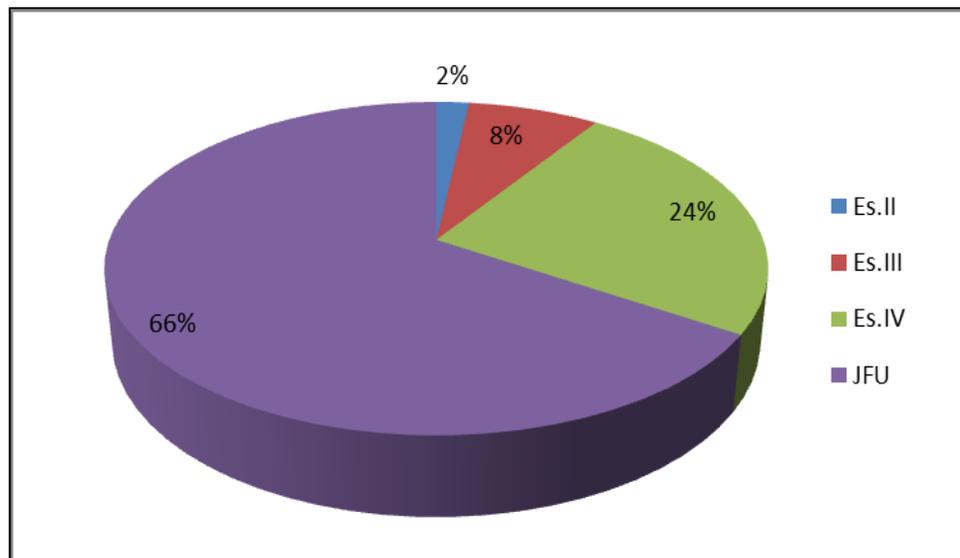
2.2.1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Secara umum jumlah Sumber Daya Manusia yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat pada awal Tahun 2019 sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) orang dengan rincian 53 (lima puluh tiga) orang PNS dan 36 (tiga puluh enam) orang tenaga kontrak. Secara lengkap gambaran tentang kepegawaian pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan komposisi pegawai dapat dilihat pada tabel 2.1, tabel 2.2. dan tabel 2.3.

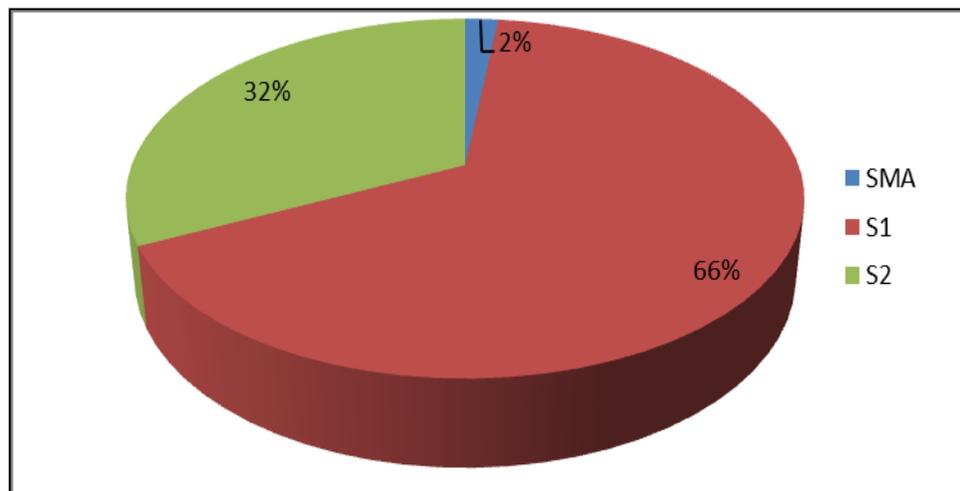
Tabel 2.1. Jumlah Pegawai

Jabatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Pejabat Struktural	8	10	18
Staf Bidang	11	10	21
Staf Administrasi/ Tata Usaha	4	5	9
Staf Laboratorium	1	4	5
Tenaga Pegawai Tidak Tetap (PTT)	13	23	36
Total	37	52	89

Berdasarkan kepangkatan/golongan jumlah pegawai Golongan IV sebanyak 10 orang (18,87%) dan Pegawai Golongan III sebanyak 43 orang (81,13%). Berdasarkan jenjang pendidikan sebanyak 17 orang memiliki gelar S2, sebanyak 35 orang memiliki gelar S1 dan setingkat SMA 1 orang.



Gambar 2.2. Pegawai Berdasarkan Golongan



Gambar 2.3. Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

2.2.2. Aset/ Modal

Terkait dengan aset/modal yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup yang meliputi sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat meliputi inventaris/peralatan kantor, kendaraan dinas, dan peralatan sampling dan pengujian laboratorium. Berikut Tabel daftar aset dinas lingkungan hidup provinsi Sulawesi Barat tahun 2012 s.d tahun 2018 :

**Tabel 2.2. Daftar aset Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2012 s.d 2018**

NO	SARANA	JUMLAH	TAHUN PENGADAAN							TAHUN SEBELUMNYA
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	KENDARAAN									
1	Kendaraan Roda 4	8			3	1	2			2
2	Kendaraan Roda 2	2								2
	MEJA									
1	Meja Rapat	1	1							
2	Meja Kerja Non Struktural	18			15		3			
3	Meja Kerja Pejabat Es. II	1								1
4	Meja Kerja Pejabat Es. III	5		5						
5	Meja Kerja Pejabat Es. IV	1							1	
	KURSI/SOFA									
1	Kursi Rapat	41			13	27				1
2	Kursi Kerja Pejabat Es. II	1								1
3	Kursi Kerja Pejabat Es. IV	8	3						5	
4	Kursi Putar	4		1					3	
5	Kursi kerja Biasa/non struktural	18		6					11	
6	Sofa	4	1	1		1			1	
	LEMARI									
1	Lemari Arsip Besi	12	5		5					2
2	Filing Besi/Metal	16	4		5				1	
3	Lemari arsip Kaca	7		7			3			
4	Filing Kabinet kayu	9		7					2	
5	Brankas	2				1				1
	PERALATAN KOMPUTER									
1	Laptop	12			3	8		1		
2	Printer	18	2	2	3	5			3	3
3	PC	8				6			2	
4	Hardisk	5				3			2	
	PERALATAN KANTOR									
1	Kamera	4	1			3				-
2	Proyektor	3	1			2				
3	AC	14		6			8			-
4	Televisi	3				3				
5	GPS	3				3				
6	Band Kas	1				1				
7	Layar Film	3			1	2				
9	Sound System	1				1				
10	Genset	1					1			
11	Mesin Ketik Listrik	2			1					1
12	Mesin Absensi	2						1	1	
	PERALATAN RUMAH TANGGA									

NO	SARANA	JUMLAH	TAHUN PENGADAAN						TAHUN SEBELUMNYA
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
	KANTOR								
1	Dispenser	6	3					1	2
2	Kipas Angin	1	1						
3	Bak Air	1				1			
4	Kompore Gas	1					1		
5	Tabung Gas	3					1	2	
6	Rice Kookeer	1					1		
7	KULKAS	1							1
8	Alat rumah Tangga Lainnya	1				1			
	BANGUNAN KANTOR								
1	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	1				1			
2	Sumur gali	1						1	
	ALAT LABORATORIUM								
1	Dehumidfler	2				2			
2	Thermohgrometer	6				6			
3	Flame Fotometer	1				1			
4	Automatic Absortion spektrofotometer	1				1			
5	Lemari Asam	1				1			
6	Higro Thermongraph	1				1			
7	Turbidity Meter	1				1			
8	Alat Pengolah Air Limbah	1				1			
9	Reagen Biuret	1				1			
10	Rotating Jig	1				1			
11	Glassware Plastik	1				1			
12	High Volume Air Sampler	1				1			
13	Multi Parameter System	1				1			
14	Air sampel	-				-			
15	Water Curent Meter	1				1			
16	Horizontal/vertical water level	4				4			
17	Portable HC Analyzer	1				1			
18	Vehicle Emission Gas Analyzer	2				2			
19	Alat Lab kualitas udara lain	1				1			
20.	Termometer standar	2						2	
21	Lemari Penyimpanan	1						1	
22	Colony Counter	1						1	
23	Alat Kesehatan Perawatan Lain-lain	1						1	

NO	SARANA	JUMLAH	TAHUN PENGADAAN						TAHUN SEBELUMNYA
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
24	Cawan Patri	12							12
25	Laminar Air Flow	1							1
26	Autoclave	1							1
27	Analitical Balance	1							1
28	Tabung Reaksi	1							1
29	Botol Lab	14							14
30	Alat Lab Lingkungan Lain-lain	16							16
31	BOD Incubator	1							1

Pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat selain ditunjang oleh SDM dan sarana prasarana juga ditunjang oleh oleh tata laksana kerja berupa standar operasional pelayanan (SOP) yang terdiri dari 34 SOP terkait dengan bidang sekretariat dan bidang teknis.

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat

Kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat dilihat dari capaian kinerja pada Kualitas Lingkungan Hidup di Provinsi Sulawesi Barat yang dihitung melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup terdiri dari 3 sektor, yaitu indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks tutupan lahan, adanya penurunan indeks kualitas lingkungan hidup setiap tahun dipengaruhi oleh indeks kualitas air dan tutupan lahan. Berikut Capaian Indeks Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan pada Tabel 2.5, 2.6 dan 2.7 Tahun 2017-2020

Tabel 2.3
Indeks Kualitas Air Sulawesi Barat

Provinsi/Kabupaten	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kabupaten Pasangkayu	46,67	30,00	55,33	40,00	33,67	55,56	-	-
Kabupaten Mamuju/Mamuju Tengah	58,33	88,89	66,67	48,33	-	-	-	-
Kabupaten Majene	100,00	33,33	50,00	50,00	79,00	-	-	-
Kabupaten Polewali Mandar	96,67	96,67	64,00	42,00	59,33	33,33	-	50
Kabupaten Mamasa	90,00	100,00	50,00	48,86	53,43	67,14	-	51,82
Provinsi Sulawesi Barat	78,33	69,78	57,20	45,84	54,11	52,01	53,20	53

Tabel 2.4
Indeks Kualitas Udara Sulawesi Barat

Provinsi/Kabupaten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kabupaten Pasangkayu	99,60	99,51	97,71	96,42	99,26	99,64	94,53	94,96	92,94
Kabupaten Mamuju	99,28	98,18	97,36	95,46	99,21	99,57	92,29	92,11	92,88
Kabupaten Majene	99,40	99,78	98,28	97,85	99,35	98,92	81,91	88,48	86,87
Kabupaten Polewali Mandar	-	99,44	97,88	97,85	99,23	99,33	88,66	84,14	85,51
Kabupaten Mamasa	99,50	99,58	98,59	97,06	99,41	99,61	87,32	87,68	91,48
Kabupaten Mamuju Tengah	-	-	-	-	-	99,64	90,83	92,63	88,62
Provinsi Sulawesi Barat	99,41	99,20	97,43	96,68	99,29	99,45	89,23	90,00	89,72

Tabel 2.5
Indeks Tutupan Lahan Sulawesi Barat

Provinsi/Kabupaten	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pasangkayu	100,00	99,51	82,33	65,07	63,48	62,50	62,21	-	63,17
Mamuju	78,38	98,18	82,97	77,27	76,58	70,27	73,66	-	82,61
Majene	60,64	99,28	58,55	53,17	50,81	52,48	51,60	-	58,9
Polewali Mandar	100,00	99,44	34,37	36,56	40,62	40,94	39,37	-	40,77
Mamasa	100,00	99,58	71,75	66,79	67,29	68,48	66,76	-	70,5
Mamuju Tengah	-	-	-	-	-	82,23	79,41	-	80,13
Sulawesi Barat	89,71	99,20	75,44	66,96	67,28	62,82	62,17	62,08	70,52

**Tabel 2.6. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Periode 2012-2016
Provinsi Sulawesi Barat**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Penegakan Hukum Lingkungan				-	1	1	1	1	-	1	1	2	-	-	100	100	200	-
2.	Pengawasan Terhadap pelaksanaan AMDAL				5	7	8	-	-	4	4	4	-	-	80	57,14	50	-	-
3.	Pengawasan Terhadap pelaksanaan AMDAL				5	6	10	15	20	5	8	6	7	7	100	133,33	60	46,67	35
4.	Pengawasan terhadap wilayah longsor dari sumber mata air				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
5.	Status mutu air				1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	200	200	200	200	200
6.	Kualitas Udara				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
7.	Persentase penanganan sampah (%)		89,60		67,94	72,81	78,03	83,62	89,60	39,63	39,05	39,27	40,26	39,23	58,33	53,63	50,33	48,15	43,78
8.	Persentase penduduk berakses air minum (%)		36,35		14,10	21,77	33,60	51,86	36,35	22,65	22,65	37,91	56,70	40,90	160,63	104,04	112,83	109,33	112,52
9.	Pencemaran status mutu air (%)		27,06		12,84	15,47	18,64	22,46	27,06	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	64,87	53,85	44,93	37,09	30,78
10.	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air (%)		100		53,35	63,98	57,89	92	100	2,13	6,93	8,12	10,68	21,83	3,99	10,83	14,03	29,01	21,83
11.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal (%)		49,10		15,53	20,71	27,62	36,82	49,10	16,67	16,67	32,84	32,33	28,50	107,34	80,49	118,89	87,81	58,04
12.	Tempat pembangunan sampah (TPS) per satuan penduduk (TPS)		7.135,79		1.075,82	.604,3	.392,4	3.567,65	7.135,79	17,46	16,61	17,16	17,16	17,52	-	-	-	-	-
13.	Penegakan hukum lingkungan (%)		100		75	85,71	87,24	96,43	100	100	100	75	100	75	133,33	116,67	85,97	103,70	75

**Tabel 2.7. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Periode 2012-2016
Provinsi Sulawesi Barat**

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Belanja Langsung	3.472.063.635	4.210.406.350	7.947.000.000	21.079.938.500	28.982.064.983	3.269.150.865	3.868.197.786	7.801.682.788	20.783.646.061	27.140.518.521	94,16	91,87	98,17	98,59	93,65	70%	70%
Belanja Tidak Langsung	2.030.883.425	2.926.513.621	2.946.440.961	3.433.999.970	3.819.968.421	1.354.635.231	2.721.661.424	2.799.795.193	3.344.787.989	3.766.888.078	66,70	93,00	95,02	97,40	98,61	17%	29%
TOTAL	5.502.947.060	7.136.919.971	10.893.440.961	24.513.938.470	32.802.033.404	4.623.786.096	6.589.859.210	10.601.477.981	24.128.434.050	30.907.406.599	84,02	92,33	97,32	98,43	94,22	56%	61%

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat.

Dalam melaksanakan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat, menghadapi beberapa kelemahan, tantangan sekaligus peluang yang merupakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Daerah Kabupaten/kota, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisa KLHS untuk mencapai tujuan organisasi perangkat daerah yang telah ditetapkan yang diuraikan sebagai berikut:

a. Kelemahan

1. Terbatasnya sumber daya manusia yang kompeten di bidang lingkungan hidup khususnya dalam pengelolaan laboratorium, pengelola data dan informasi LH
2. Lemahnya koordinasi antar stakeholder maupun instansi lingkungan di Kabupaten.
3. Belum optimalnya penegakan hukum lingkungan, tidak adanya SDM khususnya Pejabat fungsional PPLH dan PPNS.
4. Keterbatasan data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup di daerah baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota.
5. Masih terbatasnya alokasi dana untuk pembiayaan program/kegiatan pelayanan publik jika dibandingkan dengan permasalahan lingkungan hidup yang ada.

b. Tantangan

1. Isu lingkungan hidup belum menjadi prioritas nasional sehingga belum ditempatkan sebagai peluang dalam pembangunan ekonomi.
2. Rencana Usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap LH yang mengabaikan izin PPLH.
3. Laju kerusakan dan pencemaran lingkungan yang terjadi tidak sebanding dengan usaha pencegahan, pemulihan dan pengelolaan lingkungan hidup yang telah dilakukan.

4. Kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajibannya untuk menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan hidup.
5. Jumlah penduduk yang semakin meningkat memicu peningkatan pencemaran dari sumber domestik.
6. Percepatan proses akreditasi laboratorium sebagai sarana pengawasan dan pemantauan kualitas lingkungan hidup.
7. Sistem penegakan hukum terutama penegakan hukum lingkungan termasuk kelembagaannya yang masih perlu ditingkatkan.
8. Perbaikan indeks kualitas lingkungan hidup khususnya Provinsi Sulawesi Barat.

c. Peluang

1. Adanya peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Perda Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Isu lingkungan yang merupakan isu internasional (global).
3. Adanya tuntutan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan, sehingga menuntut adanya peningkatan kinerja.
4. Tersedianya instrument dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan hidup antara lain Adiwiyata, Adipura, Proper, Kalpataru, Program kampung iklim, dan bank sampah.
5. Adanya dukungan kerjasama dari masyarakat pemerhati lingkungan dan kewajiban perusahaan/pelaku usaha dalam pemenuhan CSR terhadap pengelolaan lingkungan
6. Adanya kesempatan peningkatan SDM

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Sebagai salah satu lembaga teknis yang mendukung Gubernur dalam bidang lingkungan hidup yang merupakan lembaga urusan wajib non pelayanan dasar, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat selalu berupaya melaksanakan tugas dan fungsinya dengan melandaskan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan visi dan misi ke Lima (5) Gubernur Provinsi Sulawesi Barat. Untuk menyusun lingkungan strategis agar dapat tercapai optimalisasi, efisiensi dengan mengantisipasi dan meminimalisasi dampak negatif yang diakibatkan adanya pengelolaan yang tidak berwawasan lingkungan hidup. Beberapa permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya dipetakan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
-1	-2	-3	-4
1	Penurunan indeks kualitas air dan tutupan lahan	Menurunnya daya dukung lingkungan akibat semakin menurunnya kualitas air dan tutupan lahan	Meningkatnya laju pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan hidup di Provinsi Sulawesi Barat dipengaruhi oleh Peningkatan laju pertumbuhan penduduk Peningkatan laju pertumbuhan penduduk berdampak signifikan terhadap laju pencemaran dan kerusakan lingkungan. Berdasarkan hasil perhitungan indeks kualitas lingkungan hidup, Kualitas Lingkungan Hidup di Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2017. Hasil pengukuran kualitas lingkungan hidup menunjukkan bahwa kualitas air di Sulawesi Barat mengalami penurunan yang cukup signifikan. Untuk kualitas udara, walaupun masih dalam kondisi baik, juga mengalami penurunan kualitas. Demikian hanya dengan tutupan lahan di Sulawesi Barat pada Tahun 2018 mengalami penurunan indeks sekitar 0,65

2	Permasalahan Pencemaran Lingkungan khususnya dari sampah	Kurang tersosialisasinya Peraturan Gubernur tentang Kebijakan dan strategi daerah dalam penanganan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga	Pola hidup masyarakat Sulawesi Barat dalam mengelola sampah masih sangat kurang. Sebagian besar masyarakat menjadikan sungai dan pantai sebagai tempat pembuangan sampah yang paling praktis. Akibatnya terjadi pencemaran air dan menimbulkan banjir pada musim penghujan. Selain sampah-sampah, limbah-limbah rumah tangga lainnya secara umum di Sulawesi Barat belum ada yang dikelola sebelum di buang ke lingkungan. Fenomena ini bukan hanya menjadi persoalan satu wilayah tetapi sudah menjadi isu pokok di hampir seluruh wilayah Indonesia. Untuk itu diperlukan tindakan sosialisasi atau penyuluhan ke masyarakat bagaimana mengelola sampah yang baik dengan penerapan sistem 3 R, pengolahan sampah menjadi bahan biogas dll.
3	Permasalahan Lahan Kritis, Kerusakan Hutan/Sumber-Sumber Air dan kerusakan ekosistem pesisir	Menurunnya biodiversitas yang berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan, banjir dan kekeringan, serta degradasi wilayah pesisir	Kerusakan ekosistem hutan memberikan dampak pada konservasi lahan maupun kerusakan sumber-sumber air. Kecenderungan ini tampak pada menurunnya kualitas lingkungan hidup akibat tekanan penduduk maupun bencana alam dan pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan yang melampaui daya dukung lingkungan itu sendiri. Faktor-faktor penyebab terjadinya banjir dan kekeringan/kebakaran di masing-masing daerah berdasarkan analisis data perubahan penutupan lahan dan iklim disebabkan oleh semakin luasnya lahan kritis akibat pembalakan hutan secara besar-besaran dan pembukaan lahan untuk perkebunan dan pertambangan, yang berakibat semakin luasnya padang alang-alang dan semak belukar. Lahan seperti ini sangat kecil resistensinya dalam menahan air pada musim hujan dan kekeringan pada saat musim kemarau panjang yang berdampak pada kebakaran hutan. Terjadinya lahan kritis dapat menyebabkan kerusakan fisik, kimia, dan biologi tanah. Perlu adanya upaya dan solusi untuk mengurangi lahan kritis pada masing-masing daerah yaitu melakukan reklamasi dengan membuat tanaman penghijauan, penanaman tanaman semusim, dan pembuatan teras. selain itu salah satu penyebab degradasi wilayah pesisir yaitu Pola pemukiman di Sulawesi Barat yang sebagian besar berada di wilayah pesisir secara tidak langsung berpengaruh terhadap ekosistem di sekitarnya. Kebijakan pembangunan di lain pihak memberikan

			kontribusi terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, namun di sisi lain berdampak terhadap degradasi lingkungan Potensi dan sumber daya ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil di Sulawesi Barat sangat potensial untuk dikembangkan, baik dari segi peningkatan perekonomian maupun untuk pengembangan pariwisata. Berdasarkan data, kondisi hutan mangrove di Sulawesi Barat terancam mengalami kerusakan diakibatkan Perilaku dan pola hidup masyarakat yang hidup di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang tidak memperhatikan kearifan lokal dalam mengelola lingkungannya akan berdampak terhadap rusaknya ekosistem. Untuk itu, diperlukan upaya-upaya penanggulangan serta perlindungan terhadap kawasan ekosistem hutan mangrove di Sulawesi Barat.
4	Kurangnya partisipasi masyarakat khususnya sekolah dalam program generasi lingkungan	Pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan hidup dan berkelanjutan belum menjadi kegiatan yang menarik untuk dikembangkan	Perkembangan pembangunan sekarang ini seringkali mengabaikan aspek lingkungan hidup karena dipengaruhi oleh pola hidup masyarakat masa kini yang kurang peduli terhadap lingkungan hidup. Untuk itu, pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan perhatian khusus kepada pengembangan generasi lingkungan. Keberlangsungan hidup di bumi ini adalah tanggung jawab kita bersama, termasuk di dalamnya adalah masyarakat; baik usia dewasa ataupun muda yang dikenal dengan generasi muda

3.2. TELAHAH VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat mempunyai tugas “Membantu Gubernur melaksanakan perumusan, kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pemantauan dan evaluasi urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup”. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1) Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional bidang penataan dan penataan PPLH, Pengelolaan sampah, Limbah B3 dan peningkatan kapasitas,

- pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta unit pelaksana teknis daerah;
- b. Penyelenggaraan perumusan dan penetapan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. Penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian pelaksanaan tugas-tugas dibidang pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - d. Penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan dan kerjasama dalam rangka tugas dan fungsi dinas.

Dalam penyusunan RENSTRA Mengacu pada visi, misi serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode 2017 – 2022 sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 – 2022. Visi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2017 – 2022 adalah "**Sulawesi Barat Maju dan Malaqbi**" yang diartikan: **Sulawesi Barat Maju** : Seajar dengan propinsi maju lainnya di Indonesia terkhusus di kawasan timur Indonesia dengan mendorong 3 aspek pembangunan yaitu : Maju dari aspek pendidikan, kesehatan dan pendidikan masyarakat; Maju dalam pengelolaan tata pemerintahan yang bersih dan profesional; Maju dalam pengembangan infrastruktur daerah serta pengelolaan SDA yang optimal.

Sulawesi Barat Malaqbiq "didefinisikan" Masyarakatnya Malaqbiq, dalam arti berpengetahuan, berketerampilan, berbudaya dan religius; Alam dan lingkungan yang Malaqbiq, dalam terkelola dengan baik dan profesional untuk kesejahteraan rakyat dan Malaqbiq dalam berhubungan dunia luarnya dan propinsi lainnya dalam jejaringnya kuat dan dihormati sehingga dipercaya dengan tujuan untuk membangun Sulbar yang lebih maju.

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut selanjutnya

dijabarkan dalam 5 (Lima) misi. Pada salah satu misi yakni misi ke 5 ***"Mengarusutamakan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan"*** mempunyai arah keterkaitan yang sangat jelas dengan urusan lingkungan hidup yang merupakan urusan pemerintahan yang dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat.

Tujuan dari misi ke 5 tersebut adalah : kesatuan dan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Dalam lingkungan hidup terdapat ekosistem, yaitu tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam bentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.

Guna mencapai visi misi yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022, maka Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat menyusun rencana pelaksanaan dalam Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan, Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan; Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut; pengembangan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam. Rencana tersebut selanjutnya akan menjadi acuan dalam pelaksanaan operasional kegiatan perangkat daerah yang akan dijabarkan dalam dokumen Rencana Kerja (Renja).

Pada strategi dan arah kebijakan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022, ditetapkan 2 (dua) strategi umum yaitu meningkatkan kualitas lingkungan Hidup dan Menekan jumlah luasan lahan kritis di provinsi sulawesi barat. Dengan strategi dan kebijakan tersebut maka masalah lingkungan

hidup harus menjadi program atau kebijakan prioritas dalam seluruh kegiatan pembangunan di wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Hal ini menjadi salah satu faktor pendorong yang mempengaruhi pencapaian visi misi serta tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Barat.

Beberapa faktor yang dapat menjadi penghambat pencapaian misi antara lain :

- Menurunnya daya dukung lingkungan akibat semakin menurunnya kualitas air dan tutupan lahan.
- Permasalahan pencemaran lingkungan khususnya dari sampah akibat kurang tersosialisasinya Peraturan Gubernur tentang Kebijakan dan strategi daerah dalam penanganan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga
- Semakin menurunnya kualitas tutupan lahan yang diakibatkan dari lahan kritis yang berakibat pada banjir, kekeringan dan kerusakan wilayah pesisir.
- Pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan hidup dan berkelanjutan belum menjadi kegiatan yang menarik untuk dikembangkan yang ditandai dari Masih kurangnya sekolah yang mengikuti program sekolah berbudaya lingkungan dan masih kurangnya kelompok peduli lingkungan yang terbentuk.

3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L

Berangkat dari pandangan, harapan dan permasalahan yang ada, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merumuskan tujuan pembangunan Tahun 2015-2019, yaitu memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumberdaya berada rentang populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumberdaya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional.

Berdasarkan tujuan pembangunan ini, peran utama Kementerian tahun 2015-2019 yang akan diusung, adalah : (1) Menjaga kualitas LH yang memberikan daya dukung, pengendalian pencemaran, pengelolaan DAS, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim; (2) Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk menopang kehidupan, menyediakan hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat, dan menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta endangered species; (3) memelihara kualitas lingkungan hidup, menjaga hutan, dan merawat keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumberdaya Selanjutnya, untuk memastikan peran pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dirumuskan sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sasaran strategis ini akan menjadi panduan dan mendorong arsitektur kinerja tahun 2015-2019.

Sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 adalah :

- 1) Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,5-68,6, angka pada tahun 2014 sebesar 63,42.. Anasir utama pembangun dari besarnya indeks ini yang akan ditangani, yaitu air, udara dan tutupan hutan;
- 2) Memanfaatkan potensi Sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, dengan indikator kinerja peningkatan kontribusi SDH dan LH terhadap devisa dan PNBK. Komponen pengungkit yang akan ditangani yaitu produksi hasil hutan, baik kayu maupun non kayu (termasuk tumbuhan dan satwa liar) dan ekspor; dan,
- 3) Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk

mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan indikator kinerja derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun.

Kinerja ini merupakan agregasi berbagai penanda (penurunan jumlah hotpsot kebakaran hutan dan lahan, peningkatan populasi spesies terancam punah, peningkatan kawasan ekosistem esensial yang dikelola oleh para pihak, penurunan konsumsi bahan perisak ozon, dan lain-lain).

Agenda pembangunan nasional yang terkait langsung dengan pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah : (1) agenda memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; (2) agenda pembangunan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; dan (3) agenda mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomidomestik

Berdasarkan pada sasaran tersebut diatas, maka Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional melalui pencapaian Renstra K/L dengan mereduksi permasalahan yang terkait pelayanan OPD.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 – 2034 yang bertujuan untuk mewujudkan tatanan ruang wilayah Provinsi yang produktif dan berwawasan lingkungan, yang mendukung pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup masyarakat secara

berkelanjutan, serta berbasis pada perkebunan, pertambangan, pertanian, perikanan, pariwisata dan pendidikan. Adapun permasalahan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan telaahan RTRW beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.2. Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Berdasarkan Telaahan RTRW Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.

RTRW Terkait Tugas dan Fungsi PD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan penataan lingkungan hidup sesuai dengan tata ruang 2. Penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 3. Penetapan daya dukung dan daya tampung 4. Meningkatkan peran serta masyarakat 5. Meningkatkan penerapan sanksi hukum bagi pelaku pencemaran lingkungan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunnya daya dukung, fungsi dan kualitas lingkungan hidup 2. Belum adanya rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 3. Masih rendahnya pengelolaan sumber daya alam yang kurang menerapkan prinsip ramah lingkungan 4. Belum dilakukannya pengembangan penggunaan sumber daya alternatif 5. Belum optimalnya pengawasan usaha 6. Masih meningkatnya pencemaran air khususnya air sungai 7. Kurangnya penegakan hukum lingkungan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya keterpaduan pengelolaan lingkungan hidup lintas sektoral sehingga perbaikan lingkungan hidup masih bersifat parsial. 2. Masih terbatasnya infrastruktur untuk menerapkan teknologi ramah lingkungan 3. Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya regulasi tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 2. Adanya kelembagaan (pemerintah dan masyarakat) dalam mengelola lingkungan hidup

Pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat tidak hanya memperhatikan sisi pola ruang, peruntukan, pengembangan, pelestarian, pemanfaatan dan pengendalian saja tetapi juga menggunakan dokumen KLHS yang merupakan salah satu instrumen pengelolaan lingkungan hidup. Kajian pengaruh kebijakan dan program berdasarkan 6 kriteria, antara lain :

- 1) Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan. Pengembangan pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat perlu memperhatikan daya dukung dan daya tampung kawasan yang memiliki layanan ekosistem tinggi seperti jasa ekosistem pangan dan air. Berdasarkan daya dukung dan daya tampung berbasis jasa ekosistem pangan dan air di Provinsi Sulawesi Barat, terdapat kecamatan-kecamatan yang memiliki layanan jasa ekosistem tinggi sehingga kawasan-kawasan tersebut perlu dihindari untuk dikembangkan.
- 2) Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup. Karakter wilayah Provinsi Sulawesi Barat yang berupa perbukitan dan pegunungan serta wilayah pengembangan yang dominan berada di morfologi tersebut menyebabkan wilayah provinsi ini sangat rentan terhadap bencana dan sangat berisiko terhadap kondisi lingkungan kedepannya. Berdasarkan data kerawanan bencana di Provinsi Sulawesi Barat diketahui bahwa wilayah ini rentan terhadap bahaya banjir, tsunami, tanah longsor dan gempa bumi. Program pengembangan wilayah di Provinsi Sulawesi Barat, perlu memperhatikan kawasan-kawasan yang rentan bencana. Sedapat mungkin pembangunan yang direncanakan menghindari kawasan tersebut. Hasil analisis data infrastruktur Provinsi Sulawesi Barat yang diperoleh dari Rencana Tata Ruang Provinsi Sulawesi Barat diketahui bahwa terdapat jalan eksisting saat ini yang berada pada kawasan yang rawan bencana banjir dengan panjang 210,14 km.
- 3) Kinerja layanan/jasa ekosistem. Kajian terutama ditujukan untuk memperkirakan kinerja layanan atau fungsi ekosistem yang terutama

didalamnya adalah layanan/fungsi penyedia, ekosistem memberikan jasa/produk darinya, seperti sumber daya alam, sumber daya genetika, dan air. Kajian dilakukan terutama ditujukan untuk mengidentifikasi jenis-jenis layanan/fungsi suatu ekosistem serta gambaran kemampuan dan keberfungsinya.

- 4) Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam di Provinsi Sulawesi Barat, perlu memperhatikan dampak-dampak yang ditimbulkan kedepannya. Pengembangan program-program dari RPJMD dan Renstra perlu mempertimbangkan ketentuan yang telah tertuang dalam RTRW Provinsi yang mengatur pemanfaatan lahan di daratan dan RZWP3K Provinsi yang mengatur pemanfaatan ruang di wilayah pesisir. Berdasarkan data pemanfaatan ruang yang diatur dalam Rencana Pola Ruang RTRW Provinsi Sulawesi Barat, Kawasan lindung yang meliputi hutan lindung, Kawasan konservasi dan Kawasan lindung Provinsi sebesar 38,1% dari luas Provinsi Sulawesi Barat, 27,2% untuk sektor budidaya kehutanan dan sisanya sekitar 34% yang dapat dikembangkan untuk budidaya lainnya seperti permukiman, pertanian, perkebunan dan perikanan. Sehingga pengembangan wilayah di Provinsi Sulawesi Barat perlu mempertimbangkan status dari fungsi Kawasan tersebut. Untuk pengembangan wilayah perairan seperti peningkatan infrastruktur laut, juga perlu memperhatikan kawasan-kawasan perlindungan pesisir dan perairan yang telah diatur dalam RZWP3K Provinsi Sulawesi Barat. Adapun rincian kawasankawasan yang sebaiknya dihindari dalam pengembangan kawasan perairan Provinsi Sulawesi Barat .
- 5) Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim. Implementasi program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD, sangat perlu memperhatikan kondisi-kondisi lingkungan saat ini, seperti kondisi terkait perubahan iklim. Tingkat kerentanan suatu wilayah terhadap perubahan iklim sangat dipengaruhi oleh kemampuan adaptasi

masyarakat setempat dan dukungan sarana dan prasana wilayah jika terjadi fenomena turunan dari perubahan iklim seperti meningkatnya intensitas dan cakupan wilayah bencana terkait iklim. Berdasarkan data indeks kerentanan perubahan iklim di Provinsi Sulawesi Barat, terdapat sekitar 14 wilayah administrasi desa yang memiliki tingkat kerentanan sangat rentan. Tingginya kerentanan wilayah tersebut sangat dipengaruhi oleh rendahnya kemampuan adaptasi dan layanan sarana dan prasana wilayah pendukung. Sehingga program pembangunan yang dapat menurunkan tingkat kerentanan tersebut dapat diarahkan pada wilayah-wilayah tersebut. Selain memperhatikan kawasan-kawasan yang memiliki tingkat kerentanan sangat tinggi, pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat juga perlu memperhatikan wilayah-wilayah yang memiliki layanan jasa ekosistem pengaturan kualitas udara tinggi. Dimana sedapat mungkin pembangunan dapat menghindari kawasan-kawasan dengan kategori tinggi tersebut. Hal ini dimaksudkan, agar wilayah Provinsi Sulawesi Barat memiliki kawasan yang mampu menyerap pemicu terjadinya perubahan iklim seperti emisi GRK dan lain-lain yang terjadi akibat pembangunan pada kawasan-kawasan budidaya. Berdasarkan data jasa ekosistem pengaturan kualitas udara di Provinsi Sulawesi Barat diketahui bahwa terdapat sekitar 1.227.479,58 ha wilayah Provinsi Sulawesi Barat memiliki tingkat pengaturan kualitas udara sangat tinggi.

- 6) Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati. Analisis dilakukan dengan cara a. Mengkaji pemanfaatan dan pengawetan spesies/jenis tumbuhan dan satwa, yang meliputi: Penetapan dan penggolongan yang dilindungi atau tidak dilindungi, Pengelolaan tumbuhan dan satwa serta habitatnya, Pemeliharaan dan pengembangbiakan, Pendayagunaan jenis atau bagian-bagian dari tumbuhan dan satwa liarnya, Tingkat keragaman hayati dan keseimbangannya, Mengkaji ekosistem, yang meliputi: Interaksi jenis tumbuhan dan satwa, Potensi jasa yang diberikan dalam konteks daya

dukung dan daya tampung, Mengkaji genetik, yang meliputi: Keberlanjutan sumberdaya genetik, Keberlanjutan populasi jenis tumbuhan dan satwa. Hutan di Provinsi Sulawesi Barat yang cukup luas diatas 30% (sekitar 48% dari luas wilayah keseluruhan), menjadi potensi keanekaragaman hayati tersendiri untuk Provinsi Sulawesi Barat dan menjadi habitat bagi makhluk hidup yang bermukim di wilayah tersebut. Berdasarkan data indikatif jasa ekosistem pendukung habitat, wilayah Provinsi Sulawesi Barat memiliki luasan pendukung habitat sangat tinggi dan tinggi dengan luasan 807.710,64 ha. Wilayah dengan kategori ini perlu dihindari untuk pengembangan yang bersifat merubah pemanfaatan lahan misalnya dari hutan ke non hutan atau melakukan aktifitas pada wilayah tersebut seperti peningkatan jaringan transportasi, permukiman, industri maupun pertambangan. Selain kawasan dengan jasa ekosistem pendukung habitat tinggi, pengembangan wilayah di Provinsi Sulawesi Barat juga perlu memperhatikan status kawasan hutan yang ada saat ini.

Kebijakan Rencana dan Program Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat harus sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan sehingga diharapkan dapat mengurangi terjadinya kerusakan lingkungan hidup. KLHS menjadi kerangka intergratif dalam menjamin pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dengan berwawasan lingkungan hidup dan membantu menangani permasalahan lintas batas dan lintas sektor baik tingkat kabupaten/kota maupun provinsi dan menjadi dasar acuan bagi proses penentuan kebijakan, perumusan strategi dan rancangan program.

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat ini yaitu dari tahun 2017-2022 diperkirakan akan dihadapi beberapa isu-isu strategis antara lain :

- Meningkatnya laju Pencemaran dan kerusakan Lingkungan yang diakibatkan dari penurunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
- Permasalahan Pencemaran Lingkungan khususnya dari sampah
- Permasalahan Lahan Kritis, Kerusakan Hutan/Sumber-Sumber Air dan kerusakan ekosistem pesisir
- Kurangnya partisipasi masyarakat khususnya sekolah dalam program generasi lingkungan

Adapun isu strategis tersebut muncul dari data-data lapangan yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya laju Pencemaran dan kerusakan Lingkungan yang diakibatkan dari penurunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Kualitas air di Provinsi Sulawesi Barat dipengaruhi oleh kegiatan aktifitas masyarakat yang bermukim di sepanjang aliran sungai. Hampir sebagian besar masyarakat di Sulawesi Barat bermukim di sepanjang aliran sungai yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap tingkat pencemaran air. Peningkatan pencemaran air di Sulawesi Barat menjadi isu prioritas yang perlu mendapat perhatian. Hasil pemantauan kualitas air di Sulawesi Barat menunjukkan bahwa indeks kualitas air hanya mencapai 52,01. Kondisi ini dipengaruhi oleh turunnya kualitas air di Sungai Mandar yang hanya mencapai indeks 33,33. Peningkatan pencemaran air di Sungai Mandar diakibatkan oleh tekanan dari limbah domestik baik cair maupun padat. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya bakteri e-coli yang sangat jauh di atas baku mutu yang telah ditetapkan.

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 34 Tahun 2015, ditetapkan baku mutu air sesuai dengan peruntukannya. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan kelas air pada sumber-sumber air (sungai, danau, waduk) sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Bagi sungai-sungai lintas provinsi, kelas air ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah, sungai-

sungai lintas kabupaten, kelas air ditetapkan oleh pemerintah provinsi dan sungai-sungai dalam wilayah kabupaten/kota ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota. Berdasarkan hasil pemantauan kualitas air, indeks kualitas air Provinsi Sulawesi Barat dihitung berdasarkan hasil pemantauan pada 3 (tiga) sungai besar di Sulawesi Barat yakni; Sungai Lariang, Sungai Mandar dan Sungai Mamasa yang dipantau oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat. Hasil perhitungan indeks kualitas air sungai menunjukkan bahwa semua sungai di Sulawesi Barat pada tahun 2018 ini mengalami pencemaran. Hal ini disebabkan oleh penurunan kualitas lingkungan, baik yang diakibatkan oleh peristiwa alam maupun oleh pencemaran dari aktivitas manusia. Seperti contoh di Sungai Mamasa, semua penduduk yang bermukim di sepanjang sungai membuang limbahnya ke sungai khususnya limbah cair rumah tangga. Berikut hasil perhitungan indeks kualitas air beberapa sungai wilayah Sulawesi Barat Tahun 2018.

Tabel 3.3 : Data Status Pencemaran Air Sungai di Prov. Sulawesi Barat

No	Nama Sungai	Titik	Nilai	Status Pencemaran
1	Lariang	1	-30	Cemar Sedang
		2	-18	Cemar Sedang
		3	-47	Cemar Berat
		4	-28	Cemar Sedang
		5	-29	Cemar Sedang
		6	-35	Cemar Berat
2	Mandar	1	-46	Cemar Berat
		2	-48	Cemar Berat
		3	-40	Cemar Berat
		4	-37	Cemar Berat
		5	-33	Cemar Berat
		6	-54	Cemar Berat
3	Mamasa	1	-4	Cemar Ringan
		2	-33	Cemar Berat
		3	-29	Cemar Sedang
		4	-22	Cemar Sedang
		5	-20	Cemar Sedang
		6	-12	Cemar Sedang

Sumber : Laporan Pemantauan Kualitas Air Sungai Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018

2. Permasalahan Pencemaran Lingkungan khususnya dari sampah

Sampah atau polutan organik merupakan polutan yang mudah terurai. Polutan ini akan menyebabkan pendangkalan pada suatu perairan, karena setelah diuraikan oleh mikroorganisme polutan tersebut akan mengendap dan membentuk lapisan sedimen di dasar laut. Sampah anorganik merupakan sampah atau polutan yang bersifat sulit terurai atau dapat terurai dalam jangka waktu yang sangat lama. Penumpukan sampah anorganik akan menyebabkan banjir dan aliran air akan terhalang karena lahan yang seharusnya untuk menampung air menjadi penuh oleh sampah anorganik.

Sampah kerap kali menimbulkan masalah, menjadi pemicu banjir, pencemaran lingkungan, menyebabkan bau tak sedap, merusak pandangan, dan berbagai macam masalah yang berdampak negatif pada lingkungan hidup. Seperti kita ketahui dan sering kita saksikan dilayar kaca, Beberapa tahun terakhir ini Banjir merupakan salah satu persoalan yang akrab dengan semua Negara di dunia, bahkan yang paling parah, hamper sebagian besar wilayah di Indonesia merupakan banjir langganan tiap tahun saat datangnya musim penghujan. Adapun pemicu banjir itu selain besarnya curah hujan juga diakibatkan adanya penumpukan sampah di saluran air.

Kejadian seperti diatas juga tidak akan menutup kemungkinan bakal terjadi di daerah tidak terkecuali di Sulawesi Barat. Penumpukan sampah di saluran-saluran air menyebabkan pendangkalan kali, tersumbatnya aliran air (drainase), yang pada akhirnya menimbulkan genangan air yang berpotensi menimbulkan banjir. Selain banjir, dampak yang ditimbulkan dari pola pembuangan sampah sembarangan adalah terjadinya pencemaran air. Di sisi lain, air buangan limbah rumah tangga di Sulawesi Barat khususnya di perkotaan sebagian besar langsung di alirkan ke badan air. Khusus bagi penduduk yang bermukim di sepanjang pinggir sungai, pembuangan tinja langsung dialirkan ke badan air.

Pola hidup masyarakat Sulawesi Barat dalam mengelola sampah masih sangat kurang. Sebagian besar masyarakat menjadikan sungai dan pantai sebagai tempat pembuangan sampah yang paling praktis. Akibatnya terjadi pencemaran air dan menimbulkan banjir pada musim penghujan. Selain sampah-sampah, limbah-limbah rumah tangga lainnya secara umum di Sulawesi Barat belum ada yang dikelola sebelum di buang ke lingkungan. Fenomena ini bukan hanya menjadi persoalan satu wilayah tetapi sudah menjadi isu pokok di hampir seluruh wilayah Indonesia.

Gambar 3.1 : Dokumentasi Pencemaran Lingkungan



Sumber : Dari berbagai sumber.

Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah merupakan tempat di mana sampah mencapai tahap akhir dalam pengelolaannya sejak mulai timbul di sumber, pengumpulan, pemindahan/pengangkutan, pengolahan dan

pembuangan. TPA merupakan tempat dimana sampah diisolasi secara aman agar tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan sekitarnya. Karenanya diperlukan penyediaan fasilitas dan perlakuan yang benar agar keamanan tersebut dapat dicapai dengan baik. Berdasarkan data SLHI tahun 2017, kondisi TPA di Indonesia sebagian besar merupakan tempat penimbunan sampah terbuka (*open dumping*) sehingga menimbulkan masalah pencemaran pada lingkungan. Data menyatakan bahwa 90% TPA dioperasikan dengan *open dumping* dan hanya 9% saja yang menggunakan sistem *controlled landfill* dan *sanitary landfill*. Perbaikan kondisi TPA sangat diperlukan dalam pengelolaan sampah khususnya pada skala perkotaan. Hingga saat ini, jumlah TPA di Sulawesi Barat sebanyak 6 TPA yang tersebar masing-masing di setiap kabupaten. Dari 6 TPA di Sulawesi Barat, 2 diantaranya menggunakan sistem *controlled landfill* dan lainnya adalah *open dumping*.

Tabel 3.4
Jenis Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah

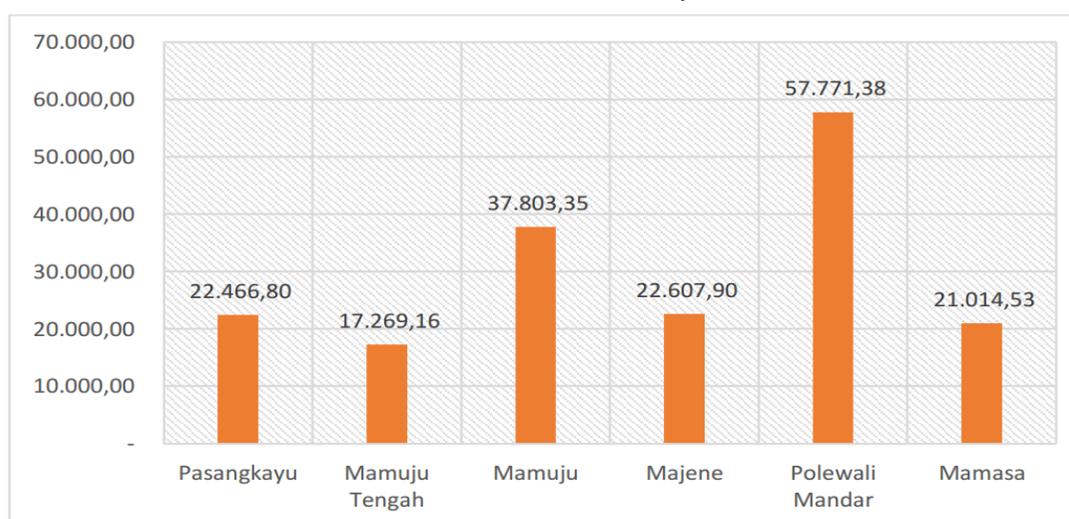
Kabupaten	Nama TPA	Jenis TPA	Luas TPA (Ha)	Kapasitas (M3)
Pasangkayu	Batu Terang Bantaeng	<i>Open dumping</i>	1	tad
Mamuju Tengah	Tabolang	<i>Open dumping</i>	4	36.4
Mamuju	Adi - Adi	<i>Controlled landfill</i>	35	tad
Majene	Tande	<i>Open dumping</i>	2.50	tad
Polewali Mandar	TPA Matakali	<i>Controlled landfill</i>	6	208.681
Mamasa	Salubue	<i>Open dumping</i>	1	21.2

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Daerah Prov. Sulbar, 2018

Timbulan sampah bisa dinyatakan dengan satuan volume atau satuan berat. Jika digunakan satuan volume, maka derajat perwadahan (densitas sampah) harus dicantumkan. Oleh karena itu, perhitungan timbulan sampah pada umumnya menggunakan satuan berat karena tingkat ketelitiannya lebih tinggi dan tidak perlu memperhatikan derajat pemadatan. Untuk prakiraan timbulan sampah di Provinsi Sulawesi

Barat, dihitung berdasarkan rata-rata sebaran penduduk. Jumlah timbulan sampah di Sulawesi Barat paling besar berada di Kabupaten Polewali Mandar dan paling sedikit di Kabupaten Mamuju Tengah. Kondisi ini dipengaruhi oleh sebaran penduduk di Sulawesi Barat paling banyak berada di Kabupaten Polewali Mandar dan paling sedikit di Kabupaten Mamuju Tengah.

Gambar 3.2
Prakiraan Timbulan Sampah



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Daerah Prov. Sulbar, 2018

Salah satu permasalahan dalam pengelolaan persampahan adalah jumlah sarana prasarana persampahan tidak berbanding lurus dengan volume sampah yang dihasilkan. Penanganan pengangkutan sampah di hampir seluruh daerah hanya dilakukan di ibukota kabupaten/kota. Untuk Provinsi Sulawesi Barat, mayoritas sampah yang dihasilkan di daerah pedesaan tidak dapat terangkut dan tertangani.

3. Permasalahan Lahan Kritis, Kerusakan Hutan/Sumber-Sumber Air dan kerusakan ekosistem pesisir

Lahan kritis dapat didefinisikan sebagai lahan yang telah mengalami kerusakan sehingga berkurang fungsinya sampai pada batas yang ditentukan atau diharapkan. Fungsi yang dimaksud pada defenisi tersebut

adalah fungsi produksi dan fungsi tata airnya. Fungsi produksi berkaitan dengan fungsi tanah sebagai sumber unsur hara bagi tumbuhan dan fungsi tata air berkaitan dengan fungsi tanah sebagai tempat berjangkarnya akar dan menyimpan air tanah. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya lahan kritis adalah :

- Terjadinya longsor dan letusan gunung berapi.
- Penebangan liar (illegal logging).
- Kebakaran hutan.
- Pemanfaatan sumber daya hutan yang tidak berasaskan kelestarian.
- Penataan zonasi kawasan belum berjalan.
- Pola pengelolaan lahan tidak konservatif.
- Pengalihan status lahan (berbagai kepentingan).

Lahan kritis umumnya terdapat di daerah pegunungan atau di daerah aliran sungai (DAS) bagian hulu, dengan ciri utama antara lain lahan berlereng terjal, tanpa atau sedikit vegetasi penutup tanah (gundul), adanya tanda-tanda lahan telah tererosi, dan tanah berwarna merah karena lapisan atasnya telah tererosi. Kerusakan ekosistem hutan memberikan dampak pada konservasi lahan maupun kerusakan sumber-sumber air.

Tabel 3.5
Luas Lahan Kritis di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan

No.	Kabupaten	Kritis (Ha)				Sangat Kritis (Ha)				Penyebab Lahan Kritis
		Hutan Produksi	Hutan Lindung	Hutan Konservasi	Luar Kawasan Hutan	Hutan Produksi	Hutan Lindung	Hutan Konservasi	Luar Kawasan Hutan	
1	Pasangkayu	2.186,00	103.049,00	8.457,00	14.120,00	-	-	-	-	tad
2	Mamuju Tengah	28.616,00	16.275,00	-	13.892,00	-	-	-	206,21	tad
3	Mamuju	41.057,00	132.765,00	12.510,00	48.467,00	-	-	-	59,65	tad
4	Majene	-	45.091,00	-	19.808,00	-	-	-	-	tad
5	Polewali Mandar	-	65.464,00	-	45.408,00	-	-	-	2.856,00	tad
6	Mamasa	-	89.386,00	400,00	33.294,00	-	-	-	9.880,00	tad

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat

Kerusakan ekosistem hutan memberikan dampak pada konservasi lahan maupun kerusakan sumber-sumber air. Kecenderungan ini tampak pada menurunnya kualitas lingkungan hidup akibat tekanan penduduk maupun bencana alam dan pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan yang melampaui daya dukung lingkungan itu sendiri. Pembalakan hutan secara liar dan perambahan hutan untuk konversi menjadi lahan pertanian tidak saja mengakibatkan rusaknya habitat ekosistem namun juga mengakibatkan menurunnya biodiversitas yang berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan, banjir dan kekeringan, perubahan iklim serta dampak sosial ekonomi penyertanya. Disamping itu dengan rusaknya hutan di daerah hulu mengakibatkan tingginya sedimentasi pada daerah aliran sungai yang menyebabkan pendangkalan sungai serta menurunnya kualitas air sungai.

Faktor-faktor penyebab terjadinya banjir dan kekeringan/kebakaran di masing-masing daerah berdasarkan analisis data perubahan penutupan lahan dan iklim disebabkan oleh semakin luasnya lahan kritis akibat pembalakan hutan secara besar-besaran dan pembukaan lahan untuk perkebunan dan pertambangan, yang berakibat semakin luasnya padang. Terjadinya lahan kritis dapat menyebabkan kerusakan fisik, kimia, dan biologi tanah. Perlu adanya upaya dan solusi untuk mengurangi lahan kritis pada masing-masing daerah yaitu melakukan reklamasi dengan membuat tanaman penghijauan, penanaman tanaman semusim, dan pembuatan teras. Potensi kerusakan hutan dan lahan kritis secara tidak langsung berpengaruh terhadap ketersediaan sumber-sumber air. Salah satu faktor pendukung dalam pencadangan sumber daya air adalah kondisi hutan yang masih bagus. Jika hutan sudah rusak dan mengalami kekritisian, maka cadangan sumber air juga secara otomatis akan mengalami pengurangan.

Luas wilayah Provinsi Sulawesi Barat 16.787,18 kilometer persegi dengan luas wilayah laut sebesar 20.342 kilometer persegi. Panjang garis pantai barat memanjang dari utara ke selatan sepanjang 677 kilometer

dengan jumlah pulau sebanyak 40 pulau. Dari 6 wilayah kabupaten di Sulawesi Barat, 5 diantaranya berada di daerah pesisir pantai. Kondisi tersebut secara tidak langsung berpengaruh terhadap perkembangan ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pola pemukiman di Sulawesi Barat yang sebagian besar berada di wilayah pesisir secara tidak langsung berpengaruh terhadap ekosistem di sekitarnya. Kebijakan pembangunan di lain pihak memberikan kontribusi terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, namun di sisi lain berdampak terhadap degradasi lingkungan. Seperti diketahui, kota Mamuju sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Barat dalam proses pembangunan sarana dan prasarana serta infrastruktur dilakukan dengan cara reklamasi pantai. Salah satu contoh adalah proyek pembangunan jalan arteri yang rencananya akan menghubungkan Kantor Gubernur Sulawesi Barat sampai dengan Bandar Udara Tampa Padang, akan melewati beberapa kawasan hutan mangrove. Proyek pembangunan ini secara tidak langsung akan merusak ekosistem mangrove yang ada di perairan Mamuju.

Tabel 3.6 : Kondisi Hutan Mangrove di Sulawesi Barat

No	Kabupaten/Kota Berpesisir	Kondisi Hutan Mangrove (Ha)			Luas Total
		Kondisi Baik	Kondisi Sedang	Kondisi Rusak	
1	Mamuju	220245	286450	183555	690250
2	Majene	33,58	35,97	2,99	72,54
3	Polewali Mandar	23,9	88,25	205,18	317,33
4	Mamuju Utara	310,15	250	294	854,15
5	Mamuju Tengah	22	21	24,5	67,5
Jumlah		220.634,63	286.845,22	184.081,67	691.561,52

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat

Berdasarkan data diatas, kondisi hutan mangrove di Sulawesi Barat terancam mengalami kerusakan. Total hutan mangrove yang mengalami kerusakan mencapai 27 persen dan dalam kondisi sedang mencapai 41 persen sedangkan kondisi baik hanya mencapai 32 persen. Jika total 41 persen hutan mangrove dalam kondisi sedang ini tidak dipelihara dan dijaga kelestariannya tidak menutup kemungkinan akan mengalami kerusakan.

Untuk itu, diperlukan upaya-upaya penanggulangan serta perlindungan terhadap kawasan ekosistem hutan mangrove di Sulawesi Barat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Potensi kekayaan sumber daya alam perairan di Sulawesi Barat jika dikembangkan akan memberikan kontribusi yang cukup besar. Sebagai contoh misalnya, jika potensi terumbu karang dikembangkan dan dipelihara akan menjadi salah satu destinasi wisata yang cukup menarik di Sulawesi Barat. Namun pada kenyataannya, luas terumbu karang di Sulawesi Barat jika dibandingkan dengan luas wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sangat kurang. Berdasarkan data yang di himpun dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat, luas terumbu karang di Sulawesi Barat yang tersebar di 5 kabupaten hanya mencapai 9.719,96 hektar dari total luas perairan yang mencapai 20.342 kilometer persegi.

Untuk lebih jelasnya, kondisi terumbu karang di Sulawesi Barat dapat dilihat melalui tabel berikut :

Tabel 3.7
Kondisi Terumbu Karang di Sulawesi Barat

No.	Kabupaten	Luas Tutupan (Ha)	Sangat Baik (%)	Baik (%)	Sedang (%)	Rusak (%)
1	Pasangkayu	1084,73	18,44	31,92	23,09	26,55
2	Mamuju Tengah	51,00	0,00	0,00	70,59	29,41
3	Mamuju	7200,00	8,33	14,81	26,86	50,00
4	Majene	408,53	0,00	0,00	29,52	70,48
5	Polewali Mandar	849,23	0,00	56,23	0,00	43,77

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat

Tabel di atas menunjukkan bahwa populasi terumbu karang di wilayah Sulawesi Barat pada kondisi sangat baik, baik dan cukup hampir berbanding lurus dengan kondisi kurang. Ini menandakan bahwa potensi kekayaan alam dari terumbu karang di Sulawesi Barat sangat kurang. Jika dilihat secara wilayah, kondisi terumbu karang yang sangat kurang berada di Kabupaten

Majene dan Mamuju Tengah. Sedangkan wilayah dengan kondisi terumbu karang yang masih relatif bagus adalah di Kabupaten Mamuju Utara.

4. Kurangnya partisipasi masyarakat khususnya sekolah dalam program generasi lingkungan

Generasi muda masih memerlukan pembinaan dan pengembangan kearah yang lebih baik, agar dapat ikut serta dalam mengisi pembangunan yang kini sedang berlangsung. Pemuda di Indonesia sangat beraneka ragam dari sabang sampai merauke. Secara umum, ada 3 kategori dalam pengelompokan generasi muda berdasarkan umur dan lembaga serta luang lingkup tempat pemuda berada yakni: *Siswa*, usia antara 6 – 18 tahun, masih duduk di bangku sekolah, *Mahasiswa*, usia antara 18 – 25 tahun beradi di perguruan tinggi dan akademi dan *Pemuda di luar lingkungan sekolah maupun perguruan tinggi* yaitu mereka yang berusia 15 – 30 tahun keatas.

Perkembangan pembangunan sekarang ini seringkali mengabaikan aspek lingkungan hidup karena dipengaruhi oleh pola hidup masyarakat masa kini yang kurang peduli terhadap lingkungan hidup. Untuk itu, pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan perhatian khusus kepada pengembangan generasi lingkungan. Keberlangsungan hidup di bumi ini adalah tanggung jawab kita bermasa, termasuk di dalamnya adalah masyarakat; baik usia dewasa ataupun muda yang dikenal dengan generasi muda.

Pengembangan generasi lingkungan di Provinsi Sulawesi Barat masih belum menjadi kegiatan yang menarik untuk di kembangkan. Program pengebangan sekolah adiwiyata misalnya, sejak diprogramkan pada tahun 2012 hingga saat ini, minat dari sekolah dan partisipatif dari pemerintah kabupaten masih sangat kurang. Faktor penghambat utama adalah kurangnya kepedulian dari instansi yang menangani pendidikan untuk ikut terlibat dalam program kegiatan ini. Satu-satunya kabupaten di Sulawesi Barat

yang sangat aktif dalam program pengembangan adiwiyata adalah Polewali Mandar.

Selain pengembangan sekolah adiwiyata, pembinaan kaum muda melalui gerakan peduli lingkungan masih belum maksimal. Minat kaum muda untuk berkumpul bersama dalam kegiatan aksi lingkungan masih sangat kurang. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah perkembangan teknologi yang semakin tak terbatas.

Program Adiwiyata merupakan sebuah gerakan bersama yang digagas oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sejak tahun 2006, bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama. Program ini bertujuan untuk memberikan pendidikan lingkungan hidup secara dini kepada generasi bangsa dimulai dari bangku pendidikan. Data yang dihimpun Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 s/d 2018, jumlah sekolah peraih penghargaan adiwiyata di Sulawesi Barat baru mencapai 40 sekolah dengan kategori sekolah adiwiyata Provinsi, Nasional dan Mandiri.

Tabel 3.8 : Jumlah sekolah peraih penghargaan adiwiyata menurut Kabupaten

No.	Kabupaten	Kategori		
		Provinsi	Nasional	Mandiri
1	Polewali Mandar	17	3	4
2	Majene	6	5	-
3	Pasangkayu	2	2	-
4	Mamuju	-	1	-
5	Mamasa	-	-	-
6	Mamuju Tengah	-	-	-
Jumlah		25	11	4

Sumber : Dokumentasi Dinas LH Sulbar

Jumlah sekolah peraih penghargaan adiwiyata di Sulawesi Barat baru mencapai 78 sekolah dengan kategori sekolah adiwiyata Provinsi, Nasional dan Kabupaten.

Tabel 3.9. Jumlah Sekolah Peraih Penghargaan Adiwiyata Menurut Kategori

NO	PROGRAM ADIWIYATA	TAHUN								JUMLAH
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	Adiwiyata Provinsi	5	7	10	7	5	3	6	6	49
2	Adiwiyata Nasional	4	3	3	6	1	4	4	-	25
3	Adiwiyata Mandiri	-	-	-	1	-	3	-	-	4

Sumber : Dokumentasi Dinas LH Sulbar

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan visi dan misi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022 maka dijabarkan tujuan dan sasaran dalam mendukung pencapaian visi dan misi tersebut. Tujuan dan sasaran pada dokumen perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat memberikan arahan bagi pelaksanaan urusan bidang lingkungan hidup sebagai urusan wajib non pelayanan dasar. Gambaran secara sistematis terkait tujuan, sasaran sampai pada Indikator yang ingin dicapai Dokumen PERUBAHAN RENSTRA termuat dalam Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Capaian	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Meningkatkan indeks kualitas lingkungan	Meningkatnya kualitas air dan udara	<ul style="list-style-type: none"> • IKLHD (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah) Indikator Tujuan • Indeks Kualitas Air (Indikator sasaran) 	67,25	71	72	73	75	
				52,01	45 - 65	50-70	50-70	55-75	

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Capaian	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			<ul style="list-style-type: none"> Indeks Kualitas Udara (Indikator sasaran) 	89,26	70-95	70-95	85-100	85-100	
		Meningkatnya kualitas wilayah pesisir, penanganan lahan kritis dan sumber-sumber air	<ul style="list-style-type: none"> Persentase Peningkatan Tutupan Lahan (Indikator sasaran) 	4 Ha	4 Ha	11,98 % (35 Ha dari 292,21 Ha)	11,98 % (35 Ha dari 292,21 Ha)	11,98% (35 Ha dari 292,21 Ha)	
		Meningkatnya Pengelolaan Data/Informasi Lingkup OPD	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat Dukungan Mutu Data Sektoral dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Lingkup OPD 				4	4	

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Capaian	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Aparatur Lingkup OPD	<ul style="list-style-type: none"> Persentase ASN dengan Deskripsi Pekerjaan yang Sesuai 				72%	90%	
		Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Lingkup DLH	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup DLH 				82%	100%	

Target indikator tujuan dan indikator sasaran pada Tabel 4.1 yang ditetapkan dengan berpedoman pada hasil evaluasi Renstra sebelumnya dan target Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Berdasarkan target yang telah ditetapkan pada Tabel 4.1 dijabarkan dalam dokumen Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat.

BAB V**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pembangunan Daerah Sulawesi Barat maka diperlukan strategi dan arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan yang komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan berkelanjutan secara efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan berpedoman pada indikator dan kinerja utama serta kebijakan pembangunan berkelanjutan. Berikut Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan pada Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022.

Tabel V.1 . Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : “Sulawesi Barat Maju dan Malaqbiq”			
MISI 5 : Mengarustamakan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan indeks kualitas lingkungan	Meningkatnya kualitas air dan udara	Meningkatkan kualitas air dan udara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian pencemaran air dan udara 2. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 3. Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
	Meningkatnya kualitas wilayah pesisir, penanganan lahan kritis dan sumber-sumber air	Meningkatkan persentase penanganan wilayah pesisir dan penanganan lahan kritis dan sumber-sumber air	4. Pengendalian kerusakan wilayah pesisir 5. Pengendalian kerusakan hutan dan sumber-sumber air 6. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian kerusakan lingkungan
	Meningkatnya Pengelolaan Data/Informasi Lingkup OPD	Meningkatkan Dukungan Mutu Data Sektoral dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Lingkup OPD	7. Peningkatan peran serta SDM Lingkungan hidup dalam pengelolaan data dan informasi
	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Aparatur Lingkup OPD	Meningkatkan Persentase ASN dengan Deskripsi Pekerjaan yang Sesuai	8. Peningkatan kualitas SDm DLH
	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Lingkup DLH	Meningkatkan Capaian Kinerja Anggaran Lingkup DLH	9. Peningkatan SDM Pengelola Perencanaan dan Keuangan

BAB. VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, maka ditetapkan beberapa program/kegiatan kerja terkait dengan Dinas Lingkungan Hidup. program/kegiatan kerja ini untuk menunjang program/kegiatan Kerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Barat 2017-2022. Adapun Program dan Kegiatan yang terdapat dalam Dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat sebelum dilakukan perubahan sebanyak 12 Program (5 Program Rutin dan 7 Program Teknis) yang terdiri dari 30 Kegiatan rutin dan 62 Kegiatan teknis. Setelah terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka terjadi perubahan program dan kegiatan dan terdapat sub kegiatan. Pada perubahan program terdapat 1 Program Rutin yang terdiri dari 8 Kegiatan dan 10 Program Teknis yang terdiri dari 13 Kegiatan. Adanya perubahan kegiatan dan indikator pada Dokumen Rancangan awal Renstra dan Dokumen Perubahan Renstra terdapat pada Tahun ke-5 dan ke-6 pada matriks indikator kinerja, Program dan Pagu Indikatif (Tabel 6.1).

Adapun Matriks Indikator Kinerja, Program, Kegiatan, dan Pagu indikatif terangkum dalam Tabel 6.1.

TABEL 6.1. MATRIKS INDIKATOR KINERJA, PROGRAM, KEGIATAN DAN PAGU INDIKATIF

TUJUAN	SASARAN	Kode	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN OUTPUT	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI								
						2017		2018		2019		2020		2021		2022		TARGET SETELAH PERUBAHAN											
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp										
1	2	3	7	9	10	11	12	13	14	15	16	18	20	22	24	26	28	30	31	32	33								
Memelihara daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan sumber daya alam	Terpeliharanya daya dukung dan kualitas lingkungan hidup	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	75 Persen	75	390,400,000	80	800,000,000	85	1,252,000,000	90	1,252,000,000					100	3,694,400,000	Dinas Lingkungan Hidup									
						Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah orang perjalanan yang mengikuti rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dalam daerah	12 Bulan	90,000,000	20 Op	220,000,000	20 Op	275,000,000	20 Op	275,000,000							100 Op	860,000,000	Dinas Lingkungan Hidup					
						Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Jumlah orang perjalanan yang mengikuti rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Luar daerah	12 Bulan	100,000,000	20 Op	250,000,000	20 Op	275,000,000	20 Op	275,000,000								100 Op	900,000,000	Dinas Lingkungan Hidup				
						Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang terbeli	12 Bulan	4,000,000	7 Jenis	40,000,000	7 Jenis	100,000,000	7 Jenis	100,000,000								40 Jenis	244,000,000	Dinas Lingkungan Hidup				
						Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang terbeli	12 Bulan	38,665,000	47 Jenis	60,000,000	47 Jenis	75,000,000	47 Jenis	75,000,000								235 Jenis	248,665,000	Dinas Lingkungan Hidup				
						Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terbeli	12 Bulan	10,000,000	2 Bahan Bacaan	15,000,000	2 Bahan Bacaan	20,000,000	2 Bahan Bacaan	20,000,000								10 Bahan Bacaan	65,000,000	Dinas Lingkungan Hidup				
						Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan kantor yang terbeli	1 Paket	3,000,000	7 Jenis	85,000,000	7 Jenis	200,000,000	7 Jenis	200,000,000								35 Jenis	488,000,000	Dinas Lingkungan Hidup				
						Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Rekening Terbayarkan	12 Bulan	117,200,000	36 Rekening/Bulan	50,000,000	36 Rekening/Bulan	156,000,000	36 Rekening/Bulan	156,000,000								180 Rekening/Bulan	479,200,000	Dinas Lingkungan Hidup				
						Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bahan makan minum yang terbeli	12 Bulan	12,335,000	5 Jenis	40,000,000	5 Jenis	75,000,000	5 Jenis	75,000,000								25 Jenis	202,335,000	Dinas Lingkungan Hidup				
						Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	Jumlah komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan yang terbeli	12 Bulan	2,300,000	5 Jenis	20,000,000	5 Jenis	20,000,000	5 Jenis	20,000,000								25 Jenis	62,300,000	Dinas Lingkungan Hidup				
						Penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Jumlah Barang cetak dan Penggandaan yang tersedia	12 Bulan	10,000,000	12 Bulan	10,000,000	12 Bulan	10,000,000	12 Bulan	10,000,000								72 Bulan	40,000,000	Dinas Lingkungan Hidup				
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Yang Terkirim	12 Bulan	2,900,000	12 Bulan	10,000,000	12 Bulan	46,000,000	12 Bulan	46,000,000								72 Bulan	104,900,000	Dinas Lingkungan Hidup				
						2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	75 Persen	75	146,500,000	80	405,000,000	85	875,000,000	90	875,000,000							100	2,301,500,000	Dinas Lingkungan Hidup			
										Pengadaan Meubeler Kantor dan Laboratorium yang terbeli	Jumlah Meubeler Kantor dan Laboratorium yang terbeli	12 Bulan	10,700,000	8 Unit	80,000,000	15 Unit	200,000,000	8 Unit	200,000,000							40 Unit	490,700,000	Dinas Lingkungan Hidup	
										Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan operasional yang terpelihara	15 Unit	15,000,000	15 Unit	25,000,000	15 Unit	50,000,000	15 Unit	50,000,000							90 Unit	140,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung kantor	Terpeliharanya Peralatan gedung kantor secara rutin/berkala	12 Bulan	9,000,000	12 Bulan	30,000,000					12 Bulan	50,000,000	12 Bulan	50,000,000								72 Bulan	139,000,000	Dinas Lingkungan Hidup						
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah kendaraan operasional dan mobil jabatan yang terpelihara	6 Unit	89,600,000	6 Unit	150,000,000					6 Unit	250,000,000	6 Unit	250,000,000								36 unit	739,600,000	Dinas Lingkungan Hidup						

TUJUAN	SASARAN	Kode	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTPUT) DAN KEGIATAN OUTPUT	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2017		2018		2019		2020		2021		2022		TARGET SETELAH PERUBAHAN			
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	7	9	10	11	12	13	14	15	16	18	20	22	24	26	28	30	31	32	33
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Kantor	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional Kantor terbeli				3 Unit	80,000,000	5 Unit	150,000,000	5 Unit	150,000,000					23 Unit	380,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
			Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor secara rutin/berkala						12 Bulan	100,000,000	12 Bulan	100,000,000					48 Bulan	200,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
			Pemeliharaan rutin/berkala Perengkapan gedung kantor	Terpeliharanya Perengkapan gedung kantor secara rutin/berkala		12 Bulan	22,200,000	12 Bulan	40,000,000	12 Bulan	75,000,000	12 Bulan	75,000,000					72 Bulan	212,200,000	Dinas Lingkungan Hidup	
			3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kepatuhan Aparatur	Patuh	Patuh	54,400,000	Patuh	125,000,000	Patuh	185,000,000	Patuh	150,000,000					Patuh	514,400,000	Dinas Lingkungan Hidup	
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian dinas beserta kelengkapannya yang terbeli		1 Paket	54,400,000	80 Pakaian	75,000,000	80 Pakaian	85,000,000	80 Pakaian	75,000,000					400 Pakaian	289,400,000	Dinas Lingkungan Hidup	
			Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian hari-hari tertentu yang terbeli				80 Pakaian	50,000,000	80 Pakaian	100,000,000	80 Pakaian	75,000,000					400 Pakaian	225,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
			4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumberdaya Aparatur yang Memiliki Kompetensi sesuai Bidangny	75 Persen	75	195,000,000	80	200,000,000	85	450,000,000	90	450,000,000					100	1,295,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
			Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Sumber Daya Aparatur yang meningkatkan Kapasitasnya		12 Bulan	195,000,000	15 Ok	200,000,000	20 Ok	350,000,000	20 Ok	350,000,000					95 Ok	1,095,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
			Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Peraturan Perundang - undangan terbaru yang di sosialisasi						1 Peraturan Perundang - undangan	100,000,000	1 Peraturan Perundang - undangan	100,000,000					4 Peraturan Perundang - undangan	200,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
			5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tepat Waktu	Tepat Waktu	125,200,000	Tepat Waktu	470,000,000	Tepat Waktu	575,000,000	Tepat Waktu	575,000,000					Tepat Waktu	1,745,200,000	Dinas Lingkungan Hidup	
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program SKPD	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program SKPD yang terlaksana		1 Tahun	34,800,000	6 Kabupaten	150,000,000	6 Kabupaten	220,000,000	6 Kabupaten	220,000,000					6 Kabupaten	624,800,000	Dinas Lingkungan Hidup	
			Penyusunan RKA/DPA SKPD	Jumlah dokumen RKA/DPA SKPD tersusun		1 Dokumen	2,000,000	2 Dokumen	10,000,000	2 Dokumen	27,500,000	2 Dokumen	27,500,000					11 Dokumen	67,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
			Penyusunan Renstra SKPD	Jumlah dokumen RENSTRA SKPD tersusun		1 Dokumen	18,200,000											2 Dokumen	18,200,000	Dinas Lingkungan Hidup	
			Penyusunan RKA-P/DPA-P SKPD	Jumlah dokumen RKA-P/DPA-P SKPD tersusun		1 Dokumen	2,000,000	2 Dokumen	10,000,000	2 Dokumen	27,500,000	2 Dokumen	27,500,000					11 Dokumen	67,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
			Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	jumlah laporan keuangan akhir tahun tersusun				1 laporan	20,000,000	1 laporan	50,000,000	1 laporan	50,000,000					5 laporan	120,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
			Forum SKPD	Jumlah program dan kegiatan yang disepakati sesuai Program/kegiatan Prioritas				70 Program/kegiatan	50,000,000	70 Program/kegiatan	100,000,000	70 Program/kegiatan	100,000,000					350 Program/kegiatan	250,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan rihisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun	Jumlah laporan capaian kinerja dan rihisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun		12 Bulan	68,200,000	4 Laporan	230,000,000	4 Laporan	75,000,000	4 Laporan	100,000,000					20 Laporan	473,200,000	Dinas Lingkungan Hidup	
			Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi						2 dokumen	75,000,000	2 dokumen	50,000,000					72 Bulan	125,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	

TUJUAN	SASARAN	Kode	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN OUTPUT	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
						2017		2018		2019		2020		2021		2022					
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET SETELAH PERUBAHAN	Rp
1	2	3	7	9	10	11	12	13	14	15	16	18	20	22	24	26	28	30	31	32	33
		6	Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut	Peningkatan Indeks Tutupan Lahan	Tertutupnya lahan kritis wilayah pesisir dan Laut dengan mangrove 137,99 Ha		2,685,650,000	20 Ha	1,403,500,000	20 Ha	2,500,000,000	10 Ha	1,552,000,000					113,21 Ha	8,141,150,000	Dinas Lingkungan Hidup	
			Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut	Luas lahan kritis wilayah pesisir dan Laut yang tertutupi dengan Tanaman Mangrove (Peningkatan Indeks Kualitas Lahan)	Tertutupnya lahan kritis wilayah pesisir dan Laut dengan mangrove 137,99 Ha	26,21 Ha	2,685,650,000	20 Ha	1,403,500,000	20 Ha	2,350,000,000	10 Ha	1,402,000,000					113,21 Ha	7,841,150,000	Dinas Lingkungan Hidup	
				Inventarisasi data dan pembuatan peta kerusakan	Dokumen Status Wilayah Pesisir dan Laut (2016)													1 Dokumen & Peta		Dinas Lingkungan Hidup	
				Jumlah kelompok masyarakat pelestari lingkungan yang dibina						1 Kelompok masyarakat pelestari mangrove	150,000,000	1 Kelompok masyarakat pelestari mangrove	150,000,000					5 Kelompok masyarakat pelestari mangrove	300,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
		7	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah Provinsi	39,49% sampah yang terolah dengan baik		-	1 Dok	100,000,000	1 Dok	750,000,000	1 Dok	750,000,000					5 Dok	1,600,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
				Tertindakannya pendidikan dan pelatihan masyarakat			-	2 Pelatihan	250,000,000	2 Pelatihan	1,350,000,000	2 Pelatihan	1,200,000,000					10 Pelatihan	2,800,000,000		
			Bimbingan Teknis Pengelolaan Sampah dan TPA	Jumlah aparaturnya dan Masyarakat yang Meningkatkan kapasitasnya dalam Pengelolaan Sampah dan TPA				3 Keg	150,000,000	3 Keg	250,000,000	3 Keg	250,000,000					12 kegiatan	650,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
			Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Sampah	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengelolaan Sampah yang dihasilkan				1 dokumen	100,000,000			1 dokumen	150,000,000					1 dokumen	250,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
			Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah rumah tangga yg mengikut workshop				50	100,000,000	50	150,000,000	50	150,000,000					300	400,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
			Sosialisasi, pembinaan dan pengawasan pengelolaan persampahan	Jumlah aparaturnya dan masyarakat yang terbina dalam pengelolaan sampah terpadu						70 OK	200,000,000	70 OK	200,000,000					210 OK	400,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
				Jumlah Dokumen Inventarisasi dan pengawasan sampah terpadu						1 Dok inventarisasi Bank Sampah	300,000,000	2 Bank Sampah Terbina	200,000,000					1 Dok inventarisasi Bank Sampah dan 6 Bank Sampah Terbina	500,000,000		
			Penyediaan dan Pengembangan sarana prasarana teknologi pengelolaan sampah	Jumlah Unit pengelolaan sampah						1 Unit	450,000,000	1 Unit	400,000,000					4 Unit	850,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
		9	Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam & Lingkungan Hidup	Tertampilnya pendampingan pengakuan MHA	-	1 MHA	74,450,000	1 MHA	750,000,000	1 MHA	1,750,000,000	1 MHA	2,100,000,000					6 MHA	4,674,450,000		
				Terverifikasinya MHA dan Kearifan lokal pengetahuan tradisional	-													2 MHA dan Kearifan Lokal		Dinas Lingkungan Hidup	

TUJUAN	SASARAN	Kode	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN OUTPUT	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2017		2018		2019		2020		2021		2022		TARGET SETELAH PERUBAHAN			
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	7	9	10	11	12	13	14	15	16	18	20	22	24	26	28	30	31	32	33
				Penetapan Hak MHA	-													1 Dokumen		Dinas Lingkungan Hidup	
				Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan keterampilan	-													1 MHA		Dinas Lingkungan Hidup	
			Pengembangan program sekolah peduli lingkungan (ADWYATA)	Jumlah Sekolah Sekolah Peduli Lingkungan	61 Sekolah Adiwiyata Nasional/Provinsi	10 sekolah	74,450,000	15 sekolah	300,000,000	15 sekolah	400,000,000	15 sekolah	400,000,000					90 Sekolah	1,174,450,000	Dinas Lingkungan Hidup	
			Expose/Promosi upaya penanganan Lingkungan Hidup dan Pelestarian Alam	Persentase Upaya penanganan Lingkungan Hidup dan Pelestarian Alam yang di Expose/promosikan				90%	100,000,000	90%	500,000,000	90%	500,000,000					90%	1,100,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
			Saka Kalpataru	Persentase Jumlah kader lingkungan hidup yang aktif			6.16%	200,000,000	13.83%	300,000,000	20%	300,000,000						100% dengan jumlah kader 16.225 orang kader	800,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
				Jumlah Aparatur Yang ditingkatkan Kapasitasnya dalam Penilaian Kalpataru					25 Ok	200,000,000	25 Ok	200,000,000						50 Ok	400,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
			Pengembangan Program Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan Kearifan Lokal Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen MHA yang di inventarisir				1 Dokumen inventarisasi	150,000,000	1 Dokumen inventarisasi	350,000,000	1 Dokumen inventarisasi	350,000,000					1 Dokumen inventarisasi	850,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
				Terfasilitasinya pendampingan pengakuan MHA								1 Kegiatan	350,000,000					1 kegiatan	350,000,000		
				Terverifikasinya MHA dan Kearifan lokal pengetahuan tradisional														1 kegiatan		Dinas Lingkungan Hidup	
				Penetapan Hak MHA														1 kegiatan		Dinas Lingkungan Hidup	
				Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan keterampilan														1 kegiatan		Dinas Lingkungan Hidup	
			10 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Peningkatan Indeks Tutupan Lahan	37.2 Ha (2014-2016)	35 Ha	2,553,650,000	15 Ha	1,150,000,000	15 Ha	800,000,000	15 Ha	600,000,000					115 Ha	5,103,650,000	Dinas Lingkungan Hidup	
				Laporan Inventarisasi GRK	2,233,016 ton CO2, Dokumen Gas Rumah Kaca Tahun 2013-2016	1 laporan	29,600,000	1 laporan	200,000,000	1 laporan	300,000,000	1 laporan	300,000,000					6 laporan	800,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	

TUJUAN	SASARAN	Kode	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN OUTPUT	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2017		2018		2019		2020		2021		2022		TARGET SETELAH PERUBAHAN			
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	7	9	10	11	12	13	14	15	16	18	20	22	24	26	28	30	31	32	33
				Laporan Pelaksanaan Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi	Laporan Aksi Mitigasi dan adaptasi Perubahan Iklim Provinsi Tahun 2012 - 2016	1 laporan	18,600,000	1 laporan	1,125,000,000	1 laporan	1,850,000,000	1 laporan	1,850,000,000					6 laporan	4,843,600,000	Dinas Lingkungan Hidup	
				Penyusunan Profil Kehati, Rencana Induk Pengelolaan Kehati dan Penentuan kawasan bernilai penting	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan pengelolaan Kehati daerah yang dihasilkan			1 Dokumen	125,000,000	1 Dokumen	350,000,000	1 Dokumen	350,000,000					4 Dokumen	825,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
					Jumlah Dokumen Pemantauan Perlindungan sumber daya alam													4 Dokumen	-	Dinas Lingkungan Hidup	
				Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem dan pengembangan sistem informasi kehati	Konservasi Kehati Daerah	1 Demplot Kehati Di Kab. Majene	1 Kegiatan	18,600,000	1 Kegiatan	200,000,000	1 Kegiatan	150,000,000	1 Kegiatan	150,000,000				6 Kegiatan	518,600,000	Dinas Lingkungan Hidup	
					Pengembangan sistem informasi kehati				1 Review data dan update sistem jaringan	2 kegiatan	150,000,000	2 kegiatan	150,000,000					10 kegiatan	450,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
				Pemantauan dan Pengawasan akses lahan terbuka akibat pertambangan serta pembuatan peta lahan kritis	Jumlah Data kerusakan wilayah tambang					1 Dok	350,000,000	1 Dok	350,000,000					4 Dok	700,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
				Penyusunan kriteria baku kerusakan lingkungan	Jumlah Penetapan kebijakan pengelolaan Sumber daya alam			1 Dokumen	300,000,000	1 Dokumen	350,000,000	1 Dokumen	350,000,000					5 Dokumen	1,000,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
				Gerakan Pembaharuan Subbar Hijau (GPSH)	Penambahan Tutupan Lahan dengan Tanaman Produktif	12.500 bibit pohon tanaman produktif	39,20 Ha Tutupan Lahan dengan tanaman produktif.	1,092,850,000	20 Ha	750,000,000								139,20 Ha Tutupan Lahan dengan tanaman produktif	1,842,850,000	Dinas Lingkungan Hidup	
				Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air	jumlah titik daerah tangkapan air			500 titik	200,000,000	500 titik	200,000,000	200 titik	200,000,000					139,20 Ha Tutupan Lahan dengan tanaman produktif	600,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
					jumlah titik konservasi tangkapan air dan sumber-sumber air					3 Titik	400,000,000	2 Titik	200,000,000						600,000,000		
				Inventarisasi GRK dan penyusunan profil emis GRK	Laporan Inventarisasi GRK	2.233,016 ton CO2. Dokumen Gas Rumah Kaca Tahun 2013 - 2016	1 Dokumen	200,000,000	1 Dokumen	300,000,000	1 Dokumen	300,000,000	1 Dokumen	300,000,000				5 Dokumen	800,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
				Pembinaan Program Kampung Iklim (ProKlim)	Jumlah Desa mandiri peduli lingkungan			7 Desa Peduli Lingkungan	150,000,000	7 Desa Peduli Lingkungan	200,000,000	7 Desa Peduli Lingkungan	200,000,000					41 Desa Peduli Lingkungan+S86	550,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
					Jumlah Komite Lingkungan Hidup			7 Desa Peduli Lingkungan	100,000,000	7 Desa Peduli Lingkungan	100,000,000	7 Desa Peduli Lingkungan	100,000,000					41 Desa Peduli Lingkungan+S86	200,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	

TUJUAN	SASARAN	Kode	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTPUT) DAN KEGIATAN OUTPUT	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
						2017		2018		2019		2020		2021		2022		TARGET SETELAH PERUBAHAN				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
1	2	3	7	9	10	11	12	13	14	15	16	18	20	22	24	26	28	30	31	32	33	
			Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah data GRK dan Proklamasi		1 Dokumen	29.600,000											1 Dokumen	29.600,000	Dinas Lingkungan Hidup		
			Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air	Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan untuk Pelestarian sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air	37,2 ha (2014 – 2016)	54, 40 Ha	1.460,800,000	15 Ha	400,000,000	10 Ha	400,000,000	10 Ha	400,000,000					104,4 Ha	2.660,800,000	Dinas Lingkungan Hidup		
		13	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Peningkatan Indeks Kualitas Air	3 sungai (Kali Mamuju, Karama dan Budong-Budong)		17,300,000	40-60	250,000,000	45-65	400,000,000	50-70	400,000,000					55-75	1,067,300,000	Dinas Lingkungan Hidup		
				Peningkatan Indeks Kualitas Udara			-		-	70-95	200,000,000	75-100	200,000,000					85-100	400,000,000			
				Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi, lokasi usaha dan dampak lintas Kabupaten/kota yang ditangani	17 Pengaduan (Provinsi dan Kabupaten Kota)	10 Pengaduan	18,850,000	10 Pengaduan	350,000,000	10 Pengaduan	300,000,000	10 Pengaduan	350,000,000					60 Pengaduan	1,018,850,000			
				Jumlah Limbah B3 yang dikelola			64,400,000	1 Dok	350,000,000	1 Dok	1,000,000,000	1 Dok	900,000,000					5 Dok	2,314,400,000			
				Pembinaan dan pengawasan terkait ketataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi			1,817,770,000	25%	3,000,000,000	25%	3,350,000,000	50%	2,750,000,000					75%	10,917,770,000			
				Peningkatan Kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Provinsi			19,100,000		100,000,000		250,000,000	25 OK	450,000,000					50 OK	819,100,000			
				Tertindakannya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup	48 Penghargaan Kalpataru Tk. Provinsi	2	309,130,000	2	700,000,000	2	550,000,000	2	550,000,000					10	2,109,130,000			
				Koordinasi Penilaian Kota Sehat/ADIPURA	Jumlah Kota yang dilakukan Pemantauan Adipura	3 Kab. Penerima Sertifikat Adipura	4 kab/kota	269,130,000	4 kab/kota	350,000,000	4 kab/kota	350,000,000	4 kab/kota	350,000,000					16 Kab/Kota	1,319,130,000	Dinas Lingkungan Hidup	
				Pemberian Penghargaan Lingkungan	Penghargaan Kalpataru Tk. Provinsi	48 Penghargaan Kalpataru Tk. Provinsi	1 Kegiatan	40,000,000											1 kegiatan	40,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
				Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam pengendalian lingkungan	Penghargaan kepada masyarakat	48 Penghargaan Kalpataru Tk. Provinsi	2 kegiatan	350,000,000	2 kegiatan	350,000,000	2 kegiatan	200,000,000	2 kegiatan	200,000,000					10 kegiatan	750,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
				Pemantauan kualitas air sungai lintas kabupaten	Data Kualitas Air Sungai	3 sungai (Kali Mamuju, Karama dan Budong-Budong)	2 sungai	17,300,000	2 sungai	150,000,000	4 Sungai	200,000,000	4 Sungai	200,000,000					20 Sungai	567,300,000	Dinas Lingkungan Hidup	

TUJUAN	SASARAN	Kode	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN OUTPUT	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
						2017		2018		2019		2020		2021		2022				TARGET SETELAH PERUBAHAN	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET SETELAH PERUBAHAN	Rp
1	2	3	7	9	10	11	12	13	14	15	16	18	20	22	24	26	28	30	31	32	33
			Pemantauan Kualitas Udara Ambien	Data Kualitas Udara	Pemantauan Udara 6 Kabupaten					6 kab	200,000,000	6 kab	200,000,000					24 Kab	400,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
			Pemantauan Kualitas Air Laut	Data Kualitas Air laut	3 Kabupaten Trik Pantau Air Laut			5 kab/kota	100,000,000	5 kab/kota	200,000,000	5 kab/kota	200,000,000					25 kab	500,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
			Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper)	Data Perusahaan dalam Mengelola Lingkungan Hidup	Pemantauan 7 perusahaan dan 2 rumah sakit (kegiatan pemantauan dan pengawasan)	4 Kab/Kota	64,400,000	4 Kab/Kota	100,000,000	5 Kab/Kota	300,000,000	5 Kab/Kota	300,000,000					29 Kab/Kota	764,400,000	Dinas Lingkungan Hidup	
			Penyusunan Pergub Tata Cara Pengaduan dan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	Jumlah dokumen Pergub Tata Cara Pengaduan dan Penyelesaian Pengaduan akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Penrusakan				1 Dokumen	150,000,000	1 Dokumen	150,000,000							1 Dokumen Pergub	300,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
			Pengelolaan Pos P3SLH	Jumlah Pengaduan Lingkungan Hidup yang ditangani	17 Pengaduan (Provinsi dan Kabupaten Kota)	6 pengaduan	18,850,000	10 Kasus lingkungan (Provinsi dan Kabupaten)	100,000,000	10 Kasus lingkungan (Provinsi dan Kabupaten)	150,000,000	10 Kasus lingkungan (Provinsi dan Kabupaten)	150,000,000					56 Kasus lingkungan (Provinsi dan Kabupaten)	418,850,000	Dinas Lingkungan Hidup	
			Sosialisasi tata cara pengaduan dan Pengelolaan Pengaduan LH	Jumlah SDM Aparatur, Stakeholders dan Masyarakat ditingkatkan kapasitas dan pengetahuannya dalam tata cara pengaduan dan Pengelolaan Pengaduan LH			180 OK	100,000,000		180 OK	100,000,000							540 OK	200,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
			Bimbingan Taks Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	Jumlah SDM Aparatur ditingkatkan kapasitas dan pengetahuannya dalam tata cara penyelesaian sengketa LH						180 ok (Mamas, Polman, Majene)	100,000,000							540 Ok	100,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
			Penanganan Sengketa Lingkungan Hidup	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani														6 sengketa lingkungan	-	Dinas Lingkungan Hidup	
			Pengawasan izin lingkungan dan izin PPLH	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan yang diawasi			27 usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan	150,000,000		27 usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan	250,000,000	30 usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan	300,000,000					144 usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan	700,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
				Jumlah PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pengawasan lingkungan hidup								25 OK (PPLH dan Calon PPLH)	200,000,000					50 OK (PPLH dan Calon PPLH)	200,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
			Penegakan hukum lingkungan hidup	Peningkatan Kapasitas dan Penanganan dalam penegakan hukum lingkungan hidup		1 Kegiatan	19,100,000	40 Ok	100,000,000	75%	250,000,000	85%	250,000,000					40 Ok dan 100 %	619,100,000	Dinas Lingkungan Hidup	
			Peningkatan kapasitas dan kinerja laboratorium	Jumlah petugas lab yang ditingkatkan kapasitasnya (aparatur & analisis)			75 orang	350,000,000		15 Orang	350,000,000	15 Orang	350,000,000					145 Orang	1,050,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
			Penyediaan Sarana Prasarana Laboratorium Lingkungan	Sarana Prasarana Laboratorium Lingkungan	1 Paket Alat Lab dan Gedung Laboratorium		1 Paket	1,900,000,000		1 Paket	1,000,000,000	1 Paket	500,000,000					5 paket	3,400,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	

TUJUAN	SASARAN	Kode	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN OUTPUT	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2017		2018		2019		2020		2021		2022		TARGET SETELAH PERUBAHAN			
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	7	9	10	11	12	13	14	15	16	18	20	22	24	26	28	30	31	32	33
			Pengadaan sarana dan prasarana Pemantauan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan Hidup	Sarana dan prasarana Pemantauan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan Hidup	1 Paket Alat Lab dan Gedung Laboratorium	1 paket	1.629.920,000											1 paket	1.629.920,000	Dinas Lingkungan Hidup	
			Pengendalian Mutu Hasil Pengujian	Data Alat Terkalibrasi Dan Jumlah Pengujian Yang tervalidasi						1 Dokumen	250,000,000	1 Dokumen	250,000,000					4 Dokumen	500,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
			Pelaksanaan pengambilan sampel dan Analisa/Pengujian Sampel	Jumlah Dokumen data hasil uji lingkungan				1 Dokumen	300,000,000	1 Dokumen	350,000,000	1 Dokumen	400,000,000					5 Dokumen	1,050,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
			Penyusunan PERGUB tentang pendapatan daerah bukan pajak dan kegiatan laboratorium yang terusun	PERGUB tentang pendapatan daerah bukan pajak dan kegiatan laboratorium yang terusun		1 Dokumen	118,500,000											2 Dokumen	118,500,000	Dinas Lingkungan Hidup	
			Sosialisasi Jasa Pelayanan Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan	Jumlah Aparatur, SDM dan Stakeholder yang mengikuti Sosialisasi Jasa Pelayanan Laboratorium						50 OK	100,000,000	50 OK	100,000,000					200 OK	200,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
			Inventarisasi usaha/kegiatan Amdal, UKL-UPL, DPLH dan DELH	Jumlah Dokumen Laporan Data inventarisasi yang dihasilkan	246 usaha/kegiatan (Amdal, UKL-UPL, DPLH dan DELH)	1 Dokumen	69,350,000	1 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	250,000,000	1 Dokumen	250,000,000					5 Dokumen	669,350,000	Dinas Lingkungan Hidup	
			Pembinaan dan Pengawasan Komisi Penilai Amdal Daerah	Jumlah Komisi Penilai Amdal yang terbiasa	3 KPA (Mamuju Utara, Polman, Mamas)			3 KPA (3 Komisi Penilai Amdal Daerah)	100,000,000	4 Komisi Penilai Amdal (Kab. Mamuju, Mtra Polman dan Mamas)	200,000,000	6 Komisi Penilai Amdal Daerah (6 Kabupaten)	200,000,000					25 Komisi Penilai Amdal Daerah	500,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
			Monitoring Evaluasi Lisensi Komisi Penilai Amdal	Jumlah Komisi Penilai Amdal yang dimonitoring dan dievaluasi	3 KPA (Mamuju Utara, Polman, Mamas)			2 Komisi Penilai Amdal	100,000,000	2 KPA (KPA Kab. Mamuju Tengah dan Kab. Majene)	200,000,000	2 KPA (KPA Kab. Mamuju Tengah dan Kab. Majene)	150,000,000					10 Komisi Penilai Amdal	450,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
			Bimbingan Teknis Tata Laksana Penilaian Amdal dan Izin Lingkungan	Jumlah KPA yang ditingkatkan Kapasitasnya dalam Penilaian Amdal dan Izin Lingkungan						70 OK	200,000,000	70 OK	150,000,000					280 OK	350,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
			Bimbingan teknis Evaluasi Laporan RKL-RPL	Jumlah KPA dan pemrakarsa usaha/kegiatan yang ditingkatkan Kapasitasnya dalam Evaluasi Laporan RKL-RPL						30 OK	100,000,000							60 OK	100,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
			Pemantauan RKL-RPL di Daerah	Jumlah Dokumen Pemantauan RKL-RPL di Daerah						1 Dok	100,000,000	1 Dok	100,000,000					4 Dok	200,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
			Penyusunan Pergub Pengelolaan Limbah B3 Skala Provinsi	Jumlah Dokumen Pergub Pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkan				1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	150,000,000	1 dokumen	100,000,000					1 dokumen	350,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	

TUJUAN	SASARAN	Kode	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN OUTPUT	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2017		2018		2019		2020		2021		2022		TARGET SETELAH PERUBAHAN			
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
						11	12	13	14	15	16	18	20	22	24	26	28	30	31		
			Pemantauan dan Pengawasan terhadap Pengelolaan Limbah B3	Data hasil pemantauan limbah B3			1 Dok	150,000,000	1 Dok	200,000,000	1 Dok	200,000,000					5 Dok	550,000,000	Dinas Lingkungan Hidup		
			Inventarisasi, pemantauan, dan evaluasi izin pengelolaan limbah B3	Jumlah Dokumen Inventarisasi, pemantauan, dan evaluasi izin pengelolaan limbah B3					1 Dok	200,000,000	1 Dok	150,000,000					4 Dok	350,000,000	Dinas Lingkungan Hidup		
			Bimbingan teknis pengelolaan Limbah B3	Jumlah usaha/kegiatan/masyarakat/pegawai yang meningkatkan pengetahuannya dalam pengelolaan Limbah B3					40 OK	150,000,000	40 OK	150,000,000					160 OK	300,000,000	Dinas Lingkungan Hidup		
		15	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Tersedianya Dokumen RPPLH Provinsi	-		70,000,000	1 Dok	600,000,000	1 Dok	2,162,000,000	1 Dok	1,500,000,000				5 Dok	4,332,000,000	Dinas Lingkungan Hidup		
			Pengembangan data dan informasi lingkungan	Jumlah papan informasi lingkungan yang terpasang					100 Unit	200,000,000	100 Unit	200,000,000					400 Unit	400,000,000	Dinas Lingkungan Hidup		
			Jumlah sistem informasi lingkungan						1 Unit	400,000,000							1 Unit	400,000,000	Dinas Lingkungan Hidup		
			Penyusunan PDRB Hijau	Jumlah Dokumen PDRB Hijau Sulawesi Barat yang dihasilkan	1 Dokumen PDRB Sektor Kehutanan (2015)			200,000,000	1 Dokumen PDRB Hijau Sektor Pertanian	300,000,000	1 Dokumen PDRB Hijau Sektor Industri Pengolahan	300,000,000					5 Dokumen	800,000,000	Dinas Lingkungan Hidup		
			Penyusunan Dokumen SLHD dan IKLH Provinsi Sulawesi Barat	Jumlah Dokumen SLHD dan IKLH yang dihasilkan	2 Dokumen	2 Dokumen	70,000,000										2 Dokumen	70,000,000	Dinas Lingkungan Hidup		
			Penyusunan DIKPLHD (Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah) dan IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) Provinsi Sulawesi Barat	Jumlah Dokumen DIKPLHD dan IKLH yang dihasilkan	2 Dokumen			150,000,000	2 dokumen	162,000,000	2 dokumen	150,000,000					10 Dokumen	462,000,000	Dinas Lingkungan Hidup		
			Penyusunan KLHS	Jumlah Dokumen KLHS yang dihasilkan													1 dokumen	-	Dinas Lingkungan Hidup		
			Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam dan LH (NSDA dan LH)	Jumlah dokumen NSDA dan LH													1 dokumen	-	Dinas Lingkungan Hidup		
			Penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Jumlah Dokumen RPPLH	1 Dokumen			250,000,000	1 Dokumen	400,000,000	1 Dokumen	400,000,000					5 dokumen	1,050,000,000	Dinas Lingkungan Hidup		

TUJUAN	SASARAN	Kode	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTPUT) DAN KEGIATAN OUTPUT	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI					
						2017		2018		2019		2020		2021		2022		2022								
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET SETELAH PERUBAHAN	Rp							
1	2	3	7	9	10	11	12	13	14	15	16	18	20	22	24	26	28	30	31	32	33					
			Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Frekuensi Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan RPPLH								1 kegiatan	150,000,000					3 kegiatan	150,000,000	Dinas Lingkungan Hidup						
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Perencanaan PPLH						2 Dokumen	700,000,000	1 Dokumen	300,000,000					7 Dokumen	1,000,000,000	Dinas Lingkungan Hidup						
		17	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Peningkatan Indeks Kualitas Udara		70-95	-	70-95		70-95		75-100						85-100		Dinas Lingkungan Hidup						
				Tersedianya Ruang Terbuka Hijau				2 Lokasi		2 Lokasi	200,000,000	1 Lokasi	200,000,000					10 Lokasi	400,000,000	Dinas Lingkungan Hidup						
			Penataan Ruang Terbuka Hijau dan Pemeliharaan (RTH)	Tersedianya Ruang Terbuka Hijau				2 lokasi		500,000,000	2 lokasi	500,000,000	1 lokasi	300,000,000				10 Lokasi	1,300,000,000	Dinas Lingkungan Hidup						
				Jumlah titik RTH yang terpelihara				1 Titik		100,000,000	2 Titik	200,000,000						7 Titik	300,000,000	Dinas Lingkungan Hidup						
			Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pengelolaan RTH				1 Kegiatan		100,000,000								4 kegiatan	100,000,000	Dinas Lingkungan Hidup						
Meningkatkan indeks kualitas lingkungan	Meningkatnya kualitas air dan udara	1	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup														100%	2,021,810,000.00	100%	2,335,135,000.00	100%	4,356,945,000.00	Dinas Lingkungan Hidup		
		1.1	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Cakupan dokumen Pengendalian RPPLH yang tersusun														4 Dokumen	1,606,400,000.00	3 Dokumen	1,227,930,000.00	7 Dokumen	2,834,330,000.00	Dinas Lingkungan Hidup		
			Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi	Jumlah Dokumen RPPLH Yang tersusun														1 dokumen	435,060,000.00			1 dokumen	308,930,000.00	Dinas Lingkungan Hidup		
			Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Jumlah DIKLP dan IKLH Provinsi Sulawesi Barat														2 dokumen	258,930,000.00	2 dokumen	368,930,000.00	4 dokumen	686,858,929.00	Dinas Lingkungan Hidup		
				Jumlah Dokumen Nerasa Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat														1 dokumen	253,410,000.00				523,410,000.00	Dinas Lingkungan Hidup		
				Jumlah Dokumen PDRB Hijau Provinsi Sulawesi Barat														1 Dokumen	259,000,000.00	1 Dokumen	259,000,000.00	2 Dokumen	1,018,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup		
				Jumlah dokumen Perencanaan dan pengkajian dampak lingkungan yang bermutu														3 Komisi	200,000,000.00	3 Komisi	200,000,000.00	6 Komisi	869,060,000.00	Dinas Lingkungan Hidup		
				Jumlah Peserta Bimbingan Teknis dan Evaluasi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan														20 Orang	200,000,000.00	20 Orang	400,000,000.00	6 Komisi	869,060,000.00	Dinas Lingkungan Hidup		
		1.2	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Jumlah Dokumen KLHS yang dikaji oleh provinsi														4 KLHS	415,410,000.00	5 KLHS	1,107,205,000.00	9 KLHS	1,522,615,000.00	Dinas Lingkungan Hidup		
			Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi tersusun																1 KLHS	556,795,000.00	5 KLHS	556,795,000.00	Dinas Lingkungan Hidup		
				Jumlah KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten yang Divalidasi															2 KLHS	240,410,000.00	2 KLHS	350,410,000.00	5 KLHS	590,820,000.00	Dinas Lingkungan Hidup	

TUJUAN	SASARAN	Kode	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN OUTPUT	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2017		2018		2019		2020		2021		2022		TARGET SETELAH PERUBAHAN			
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
						11	12	13	14	15	16	18	20	22	24	26	28	30	31		
1	2	3	7	9	10	11	12	13	14	15	16	18	20	22	24	26	28	30	31	32	33
			Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan dampak/Risiko Lingkungan Hidup	Jumlah KLHS yang divalidasi										2 KLHS	175.000.000.00	2 KLHS	200.000.000.00	4 KLHS	375.000.000.00	Dinas Lingkungan Hidup	
		2	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ketepatan Izin Lingkungan dan Izin PPLH										50%	1.019.080.000.00	59%	1.157.508.000.00	59%	2.176.588.000.00	Dinas Lingkungan Hidup	
		2.1	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diberikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang dilaksanakan										20	1.019.080.000.00	25	1.157.508.000.00	45	2.176.588.000.00	Dinas Lingkungan Hidup	
			Facilitasi Pemenuhan Ketertuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan Izin PPLH	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Pemenuhan Ketertuan Izin Lingkungan dan Izin PPLH										120 orang	358.890.000.00	90 orang	353.710.000.00	310 orang	712.600.000.00	Dinas Lingkungan Hidup	
			Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Pengawasan Lingkungan Hidup										30 orang	253.710.000.00	30 orang	353.710.000.00	60 orang	607.420.000.00	Dinas Lingkungan Hidup	
			Pengawasan usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diberikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah usahadan/atau kegiatan yang wajib diawasi oleh pemerintah Provinsi										40	406.480.000.00	42	450.088.000.00	42	856.568.000.00	Dinas Lingkungan Hidup	
		3	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan										100%	921.640.000.00	100%	1.121.640.000.00	100%	2.043.280.000.00	Dinas Lingkungan Hidup	

TUJUAN	SASARAN	Kode	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTPUT) DAN KEGIATAN OUTPUT	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
						2017		2018		2019		2020		2021		2022		TARGET SETELAH PERUBAHAN				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
1	2	3	7	9	10	11	12	13	14	15	16	18	20	22	24	26	28	30	31	32	33	
		3.1	Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang Perindogan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Jumlah Pengaduan yang terangani										10	921.640.000,00	10	1.121.640.000,00	20	2.043.280.000,00	Dinas Lingkungan Hidup		
			Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Jumlah pengaduan lingkungan yang diterima										10	409.040.000,00	10	459.040.000,00	20	868.080.000,00	Dinas Lingkungan Hidup		
				Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Masyarakat										120 orang	258.890.000,00	90 orang	308.890.000,00	310 orang	567.780.000,00	Dinas Lingkungan Hidup		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Jumlah Peserta Bimbingan teknis Tata Cara Penerapan sanksi administrasi, penyelesaian sengketa, dan/atau penyidikan lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan										30 orang	253.710.000,00	30 orang	353.710.000,00	60 orang	607.420.000,00	Dinas Lingkungan Hidup		
		4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Pembinaan Peningkatan Pengelolaan Potensi Keanekaragaman Hayati Sulawesi Barat										100	800.000.000,00	100	1.400.000.000,00	100	2.200.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup		
		4.1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Jumlah kawasan pengelolaan keanekaragaman hayati yang dikelola Provinsi											5	800.000.000,00	5	1.400.000.000,00	10	2.200.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup	
			Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Profil Kehati										1 Dokumen Kehati	150.000.000,00	1 Dokumen Kehati	150.000.000,00	2 Dokumen Kehati	300.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup		
			Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah RTH yang dikelola										2 Lokasi	150.000.000,00	2 Lokasi	350.000.000,00	4 Lokasi	500.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup		
			Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Jumlah Demplot kehati Lainnya										3 Demplot Kehati	200.000.000,00	3 Demplot Kehati	400.000.000,00	6 Demplot Kehati	600.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup		
			Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah peserta bimbingan teknis										150 Ok	150.000.000,00	150 Ok	150.000.000,00	300 Ok	300.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup		
			Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah sarana prasarana pengelolaan keanekaragaman hayati										3 sarana	150.000.000,00	3 sarana	350.000.000,00	6 Sarana Demplot Kehati	500.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup		

TUJUAN	SASARAN	Kode	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN OUTPUT	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2017		2018		2019		2020		2021		2022		TARGET SETELAH PERUBAHAN			
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	7	9	10	11	12	13	14	15	16	18	20	22	24	26	28	30	31	32	33
		5	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pi (Indeks Pencemar) yang memenuhi baku mutu										67%	1,375,000,000.00	86%	1,605,000,000.00	86%	2,980,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup	
				Persentase kabupaten IKU diatas nilai 90										67%	2,050,000,000	83%	1,850,000,000	83%	3,900,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
				Cakupan Peningkatan Tutupan Lahan										30	2,400,000,000	40	2,500,000,000	83%	4,900,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup	
		5.1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah tsk pengujian yang memenuhi baku mutu kualitas udara ambien										16	925,000,000.00	20	1,105,000,000.00	20	2,030,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup	
				Persentase Parameter yang memenuhi baku mutu										78%	450,000,000.00	78%	500,000,000.00	78%	950,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup	
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah parameter dalam pemantauan kualitas lingkungan hidup										14	350,000,000.00	14	400,000,000.00	28	750,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup	
				Jumlah sungai yang ditingkatkan kualitasnya										3	450,000,000.00	3	500,000,000.00	6	950,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup	
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah kampung iklim										7 Kampung Iklim	350,000,000.00	7 Kampung Iklim	450,000,000.00	14 Kampung iklim	800,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup	
				Jumlah Laporan Inventarisasi GRK										Profil Emisi Pesektor	225,000,000.00	Profil Emisi Pesektor	255,000,000.00	2 Dokumen	480,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup	
				Persentase Peningkatan Bengkai/serwis yang mendukung pengurangan bahan perusak ozon										50%	225,000,000.00	50%	350,000,000.00	2 Dokumen	575,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup	
		5.2	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Cakupan parameter uji terakreditasi										12	2,050,000,000.00	12	1,850,000,000.00	12	3,900,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup	

TUJUAN	SASARAN	Kode	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN OUTPUT	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2017		2018		2019		2020		2021		2022		TARGET SETELAH PERUBAHAN			
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	7	9	10	11	12	13	14	15	16	18	20	22	24	26	28	30	31	32	33
			Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Uji yang tervalidasi										150 Dokumen	600,000,000.00	300 Dokumen	550,000,000.00	450 Dokumen	1,150,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup	
				Jumlah ruang lingkup pengendalian mutu yang tervalidasi										1	200,000,000.00						
				Jumlah sarana prasarana pengujian laboratorium										30	1,000,000,000.00	40	1,000,000,000.00	70	2,000,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup	
				Jumlah pengelola laboratorium yang ditingkatkan kapasitasnya										14	250,000,000.00	18	300,000,000.00	32	550,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup	
		5.3	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Luas kawasan Kerusakan Lahan yang dipulihkan kondisinya										30	2,400,000,000.00	40	2,500,000,000.00	70	4,900,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup	
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Luas wilayah yang direhabilitasi										20	900,000,000.00	25	1,000,000,000.00	45	1,900,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup	
				Jumlah Dokumen Pemetaan										2	600,000,000.00	2	600,000,000.00				
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Luas wilayah restorasi										10	600,000,000.00	15	600,000,000.00	25	1,200,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup	
				Jumlah Dokumen Pemetaan										1	300,000,000.00	1	300,000,000.00				
		6	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase limbah B3 yang terkelola										1.13%	1,000,000,000.00	2.50%	1,000,000,000.00	2.50%	2,000,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup	
		6.1	Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah titik pengumpulan limbah B3										8	1,000,000,000.00	16	1,000,000,000.00	24	2,000,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup	
			Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah perusahaan pengumpul yang difasilitasi										1	500,000,000.00	1	500,000,000.00	2	1,000,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup	

TUJUAN	SASARAN	Kode	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN OUTPUT	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2017		2018		2019		2020		2021		2022		TARGET SETELAH PERUBAHAN			
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
						11	12	13	14	15	16	18	20	22	24	26	28	30	31		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Limbah B3 yang dilaporkan										23,3513 ton	500,000,000.00	23,3513 ton	500,000,000.00	23,3513 ton	1,000,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup	
		7	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Penanganan Sampah										55,5%	1,850,000,000.00	70%	1,850,000,000.00	70%	3,700,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup	
		7.1	Penanganan Sampah di TPA/TPST regional	Volume timbunan sampah yang tertangani/terkubai											1,450,000,000.00		1,450,000,000.00		2,900,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup	
				Jumlah sarana prasarana penanganan sampah TPA regional										1	400,000,000.00	1	400,000,000.00	2	800,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup	
			Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	Jumlah dokumen kebijakan Penanganan sampah regional										1	350,000,000.00	1	350,000,000.00	2	700,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST regional	Jumlah titik penanganan sampah TPA										4	400,000,000.00	4	400,000,000.00	8	800,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup	
				Jumlah peserta bimbingan teknis penanganan sampah										200 Ok	700,000,000.00	200 Ok	700,000,000.00	400	1,400,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup	
			Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah TPA regional yang ditetapkan										1	400,000,000.00	1	400,000,000.00	2	800,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup	
		8	PROGRAM PENGUKUAN KEBERADAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERTKAT DENGAN PPLH	persentase MHA yang diakui										33%	650,000,000.00	33%	500,000,000.00	33%	1,150,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup	
		8.1	Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah MHA yang ditetapkan										1	300,000,000.00	1	300,000,000.00	2	600,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup	
			Koordinasi, sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi, Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah MHA teridentifikasi terkait PPLH										3	300,000,000.00	3	300,000,000.00	6	600,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup	

TUJUAN	SASARAN	Kode	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN OUTPUT	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2017		2018		2019		2020		2021		2022		TARGET SETELAH PERUBAHAN			
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	7	9	10	11	12	13	14	15	16	18	20	22	24	26	28	30	31	32	33
			Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Cakupan peningkatan kapasitas MHA dan Kearifan Lokal										3	350.000.000,00	3	200.000.000,00	6	550.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup	
			Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah peserta peningkatan kapasitas kelembagaan MHA dan Kearifan Lokal										300 Ok	350.000.000,00	300 Ok	200.000.000,00	600 Ok	550.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup	
		9	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Lembaga Masyarakat/Kelompok Peduli Lingkungan										100	1.100.000.000,00	100	1.100.000.000,00	100	2.200.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup	
		9.1	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah lembaga masyarakat/kelompok peduli lingkungan pilot project										3	1.100.000.000,00	3	1.100.000.000,00	6	2.200.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup	
			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Masyarakat	Jumlah peserta peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM Bid. Lingkungan Hidup untuk lembaga masyarakat										30	250.000.000,00	30	250.000.000,00	60	500.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup	
				Jumlah lembaga masyarakat/kelompok peduli lingkungan yang memperoleh peningkatan kapasitas PPLH										200 Orang	250.000.000,00	300 Orang	250.000.000,00	500 Orang	500.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup	
			Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah kader sakalipataru yang terlatih										4000	250.000.000,00	4000	250.000.000,00	8000 kader	500.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup	
				Jumlah sekolah peduli lingkungan										15 sekolah	350.000.000,00	15 sekolah	350.000.000,00	30 Sekolah	700.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup	
		10	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Cakupan penerima penghargaan lingkungan										10	700.000.000,00	11	600.000.000,00	21	1.300.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup	
		10.1	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kabupaten penerima penghargaan ADIPURA										1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	2	300.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup	
				Jumlah penerima penghargaan Kalpataru tingkat Provinsi										1	550.000.000,00	2	450.000.000,00	3	1.000.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup	

TUJUAN	SASARAN	Kode	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN OUTPUT	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2017		2018		2019		2020		2021		2022		TARGET SETELAH PERUBAHAN			
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	7	9	10	11	12	13	14	15	16	18	20	22	24	26	28	30	31	32	33
			Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perifolangan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah titik pemantauan ADIPURA										4	150,000,000.00	6	150,000,000.00	10	300,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup	
				Jumlah usulan penerima penghargaan Kalpataru tingkat Provinsi										5	150,000,000.00	5	150,000,000.00	10	300,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup	
				Jumlah usaha/kegiatan yang mengikuti PROPER										8	200,000,000.00	8	150,000,000.00	16	350,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup	
				Jumlah penghargaan PPLH yang dibagikan pada peringatan HLH										4	200,000,000.00	4	150,000,000.00	16	350,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup	
		11	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat Dukungan Mutu Data Sektoral dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Lingkup OPD										4		4		10 Dokumen		Dinas Lingkungan Hidup	
				Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup DLH										62%	9,642,587,000.00	100%	10,716,915,685.00	Taat	20,359,502,685.00	Dinas Lingkungan Hidup	
				Persentase ASN dengan Deskripsi Pekerjaan yang Sesuai										72%		90%		9		Dinas Lingkungan Hidup	
		11.1	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Data Sektoral Lingkup OPD										90	430,000,000.00	90	430,000,000.00	180	860,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup	
			Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja perangkat daerah yang tersusun										2	50,000,000.00	2	50,000,000.00	4	100,000,000.00		
			Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun										4	75,000,000.00	4	75,000,000.00	8	150,000,000.00		
			Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah yang tersusun										4	75,000,000.00	4	75,000,000.00	8	150,000,000.00		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah program/kegiatan yang disepakati sesuai dengan program/kegiatan prioritas										72	80,000,000.00	72	80,000,000.00	144	160,000,000.00		
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah evaluasi kinerja perangkat daerah										6	50,000,000.00	6	50,000,000.00	12	100,000,000.00		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah										1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	2	100,000,000.00		
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	2	100,000,000.00		
		11.2	Administrasi Keuangan	Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup DLH										90%	5,175,000,000.00	90%	5,690,655,685.00	90%	10,865,655,685.00	Dinas Lingkungan Hidup	
				Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup DLH										90%	525,000,000.00	95%	525,000,000.00	95%	1,050,000,000.00		

TUJUAN	SASARAN	Kode	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN OUTPUT	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2017		2018		2019		2020		2021		2022		TARGET SETELAH PERUBAHAN			
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	7	9	10	11	12	13	14	15	16	18	20	22	24	26	28	30	31	32	33
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Disediakan Gaji dan Tunjangan										1	5,100,000,000.00	1	5,615,655,685.00	2	10,715,655,685.00		
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang Disediakan										6	75,000,000.00	6	75,000,000.00	12	150,000,000.00		
			Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Jumlah Laporan Konsolidasi Keuangan										12	75,000,000.00	12	75,000,000.00	24	150,000,000.00		
			Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah Laporan Rekapitulasi Keuangan Bulanan										12	75,000,000.00	12	75,000,000.00	24	150,000,000.00		
			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang Dikelola dan Dilaipkan										6	75,000,000.00	6	75,000,000.00	12	150,000,000.00		
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Tersusun										3	75,000,000.00	3	75,000,000.00	6	150,000,000.00		
			Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang Tersusun										12	75,000,000.00	12	75,000,000.00	24	150,000,000.00		
			Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran										4	75,000,000.00	4	75,000,000.00	8	150,000,000.00		
			Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir yang Tersusun										1	75,000,000.00	1	75,000,000.00	2	150,000,000.00		
		11.3	Adminstrai Umum	Persentase Pengelolaan Adminstrai Umum Lingkup DLH										90%	2,717,137,000.00	95%	3,243,810,000.00	95%	5,960,947,000.00	Dinas Lingkungan Hidup	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Surat Menyurat yang Dikelola										250	95,000,000.00	250	95,000,000.00	500	190,000,000.00		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Tagihan yang Dibayarkan										36	120,000,000.00	36	120,000,000.00	72	240,000,000.00		
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Menggunakan Jasa Pihak Ketiga										12	30,000,000.00	12	30,000,000.00	24	60,000,000.00		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Menggunakan Jasa Pemeliharaan										21	100,000,000.00	21	100,000,000.00	42	200,000,000.00		
				Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Memiliki Izin										21	10,000,000.00	21	10,000,000.00	42	20,000,000.00		
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pengelolaan Administrasi Keuangan yang Menggunakan Jasa Pihak Ketiga										8	134,400,000.00	8	134,400,000.00	16	268,800,000.00		
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Pengelolaan Kebersihan Kantor yang Menggunakan Jasa Pihak Ketiga										3	57,600,000.00	3	57,600,000.00	6	115,200,000.00		
			Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Jenis Peralatan Kerja yang Mendapatkan Jasa Perbaikan										12	57,600,000.00	12	57,600,000.00	24	115,200,000.00		
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang Disediakan										47	75,000,000.00	47	75,000,000.00	94	150,000,000.00		
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang yang Dicitak										36	18,000,000.00	36	18,000,000.00	72	36,000,000.00		

TUJUAN	SASARAN	Kode	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTPUT) DAN KEGIATAN OUTPUT	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2017		2018		2019		2020		2021		2022		TARGET SETELAH PERUBAHAN			
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	7	9	10	11	12	13	14	15	16	18	20	22	24	26	28	30	31	32	33
				Jumlah Jenis Barang yang Digandakan										20000	6,000,000.00	20000	6,000,000.00	40000	12,000,000.00		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang										5	10,000,000.00	5	10,000,000.00	10	20,000,000.00		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan Kantor yang Disediakan										1	15,000,000.00	1	15,000,000.00	2	30,000,000.00		
				Jumlah Jenis Perlengkapan Kantor yang Disediakan										1	15,000,000.00	1	15,000,000.00	2	30,000,000.00		
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan										5	50,000,000.00	5	50,000,000.00	10	100,000,000.00		
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan yang Disediakan										5	28,000,000.00	5	36,000,000.00	10	64,000,000.00		
				Jumlah Jenis Bahan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan										5	10,000,000.00	5	20,000,000.00	10	30,000,000.00		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang Disediakan										5	5,000,000.00	5	15,000,000.00	10	20,000,000.00		
			Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Jenis Makanan yang Disediakan										6	81,420,000.00	6	81,420,000.00	12	162,840,000.00		
				Jumlah Jenis Minuman yang Disediakan										6	50,000,000.00	6	50,000,000.00	12	100,000,000.00		
			Rapel-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi/Konsultasi Ke Luar Daerah										20	350,000,000.00	20	399,500,000.00	40	749,500,000.00		
			Rapel-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi/Konsultasi Ke Dalam Daerah										25	300,000,000.00	25	300,000,000.00	50	600,000,000.00		
			Pengadaan Mobil Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang Diadakan										1	500,000,000.00	1	500,000,000.00	2	1,000,000,000.00		
			Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Diadakan										4	80,000,000.00	4	500,000,000.00	8	580,000,000.00		
			Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah Jenis Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas yang Diadakan										2	24,500,000.00	2	24,500,000.00	4	49,000,000.00		
			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang Diadakan										4	50,000,000.00	4	117,000,000.00	8	167,000,000.00		
			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Jenis Peralatan Gedung Kantor yang Diadakan										4	50,000,000.00	4	100,000,000.00	8	150,000,000.00		
			Pengadaan Mebeleur	Jumlah Jenis Mebeleur yang Diadakan										5	75,000,000.00	3	37,000,000.00	8	112,000,000.00		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Jenis Pemeliharaan Gedung Kantor										2	13,040,000.00	2	13,040,000.00	4	26,080,000.00		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah Jenis Pemeliharaan Mobil Jabatan										6	217,115,819.00	6	170,000,000.00	12	387,115,819.00		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Jenis Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional										15	48,750,000.00	15	48,750,000.00	30	97,500,000.00		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Jenis Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor										4	16,000,000.00	4	16,000,000.00	8	32,000,000.00		

TUJUAN	SASARAN	Kode	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN OUTPUT	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2017		2018		2019		2020		2021		2022		TARGET SETELAH PERUBAHAN			
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	7	9	10	11	12	13	14	15	16	18	20	22	24	26	28	30	31	32	33
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Jenis Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor										4	16,000,000.00	4	16,000,000.00	8	32,000,000.00		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah Jenis Mebeleur yang Mendapatkan Pemeliharaan										3	8,711,181.00	3	6,000,000.00	6	14,711,181.00		
		11.4	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat Disiplin Aparatur Lingkup DLH										100%	191,250,000.00	100%	191,250,000.00	100%	382,500,000.00	Dinas Lingkungan Hidup	
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Lingkup DLH	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Lingkup DLH										100%	604,200,000.00	100%	636,200,000.00	100%	1,240,400,000.00	Dinas Lingkungan Hidup	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang Didadakan										85	63,750,000.00	85	63,750,000.00	170	127,500,000.00		
			Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah Pakaian Kerja Lapangan yang Didadakan										85	63,750,000.00	85	63,750,000.00	170	127,500,000.00		
			Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus yang Didadakan										85	63,750,000.00	85	63,750,000.00	170	127,500,000.00		
			Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah PNS yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal										55	325,000,000.00	55	447,000,000.00	110	772,000,000.00		
			Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Persentase Keikutsertaan pada Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan										100%	50,000,000.00	100%	5,000,000.00	2	55,000,000.00		
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan										55	89,600,000.00	55	89,600,000.00	110	179,200,000.00		
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Persentase Keikutsertaan pada Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan										100%	50,000,000.00	100%	5,000,000.00	2	55,000,000.00		
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi										55	89,600,000.00	55	89,600,000.00	110	179,200,000.00		
							8,590,000,000		12,328,500,000		21,049,000,000		18,954,000,000		25,530,117,000		27,736,198,685		114,187,815,685		

TABEL 6.2. MATRIKS PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA, PROGRAM, KEGIATAN DAN PAGU INDIKATIF

TUJUAN	SASARAN	Kode	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN OUTPUT	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
						2021		2022		TARGET SETELAH PERUBAHAN				
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET SETELAH PERUBAHAN	Rp			
1	2	3	7	9	10	22	24	26	28	30	31	32	33	
Meningkatkan indeks kualitas lingkungan	Meningkatnya kualitas air dan udara	1	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup		100%	362,199,000.00	100%	2,335,135,000.00	100%	5,382,523,929.00	Dinas Lingkungan Hidup		
		1.1	Rencana Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Cakupan dokumen Pengendalian RPPLH yang tersusun		4 Dokumen	362,199,000.00	3 Dokumen	1,227,930,000.00	7 Dokumen	4,275,318,929.00	Dinas Lingkungan Hidup		
			Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi	Jumlah Dokumen RPPLH Yang tersusun		1 dokumen	362,199,000.00			1 dokumen	308,930,000.00	Dinas Lingkungan Hidup		
			Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Jumlah DIKLPH dan IKLH Provinsi Sulawesi Barat		2 dokumen	-	2 dokumen	368,930,000.00	4 dokumen	686,858,929.00	Dinas Lingkungan Hidup		
				Jumlah Dokumen Neraca Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat		1 dokumen	-		-		523,410,000.00	Dinas Lingkungan Hidup		
				Jumlah Dokumen PDRB Hiju Provinsi Sulawesi Barat		1 Dokumen	-	1 Dokumen	259,000,000.00	2 Dokumen	1,018,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup		
				Jumlah dokumen Perencanaan dan pengkajian dampak lingkungan yang bermutu		3 Komisi	-	3 Komisi	200,000,000.00	6 Komisi	869,060,000.00	Dinas Lingkungan Hidup		
				Jumlah Peserta Bimbingan Teknis dan Evaluasi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan		20 Orang	-	20 Orang	400,000,000.00	6 Komisi	869,060,000.00	Dinas Lingkungan Hidup		
			1.2	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Jumlah Dokumen KLHS yang dikaji oleh provinsi		4 KLHS	-	5 KLHS	1,107,205,000.00	9 KLHS	1,107,205,000.00	Dinas Lingkungan Hidup	
				Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi tersusun			-	1 KLHS	556,795,000.00	5 KLHS	556,795,000.00	Dinas Lingkungan Hidup	
					Jumlah KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten yang Divalidasi		2 KLHS	-	2 KLHS	350,410,000.00	5 KLHS	350,410,000.00	Dinas Lingkungan Hidup	
				Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah KLHS yang divalidasi		2 KLHS	-	2 KLHS	200,000,000.00	4 KLHS	200,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup	
			2	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ketsatan Izin Lingkungan dan Izin PPLH		50%	79,034,640.00	59%	1,157,508,000.00	59%	1,236,542,640.00	Dinas Lingkungan Hidup	
			2.1	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang dilaksanakan		20	79,034,640.00	25	1,157,508,000.00	45	1,236,542,640.00	Dinas Lingkungan Hidup	
				Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Pemenuhan Ketaatan Izin Lingkungan dan Izin PPLH		120 orang	-	90 orang	353,710,000.00	310 orang	353,710,000.00	Dinas Lingkungan Hidup	
				Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Pengawasan Lingkungan Hidup		30 orang	-	30 orang	353,710,000.00	60 orang	353,710,000.00	Dinas Lingkungan Hidup	
				Pengawasan usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah usahadan/atau kegiatan yang wajib diawasi oleh pemerintah Provinsi		40	79,034,640.00	42	450,088,000.00	42	529,122,640.00	Dinas Lingkungan Hidup	
			3	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan		100%	127,271,080.00	100%	1,121,640,000.00	100%	1,248,911,080.00	Dinas Lingkungan Hidup	

TUJUAN	SASARAN	Kode	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN OUTPUT	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2021		2022		TARGET SETELAH PERUBAHAN			
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	7	9	10	22	24	26	28	30	31	32	33
		3.1	Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Jumlah Pengaduan yang tertangani		10	127.271.080,00	10	1.121.640.000,00	20	1.248.911.080,00	Dinas Lingkungan Hidup	
			Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Jumlah pengaduan lingkungan yang diterima		10	54.464.000,00	10	459.040.000,00	20	513.504.000,00	Dinas Lingkungan Hidup	
				Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Masyarakat		120 orang	72.807.080,00	90 orang	308.890.000,00	310 orang	381.697.080,00	Dinas Lingkungan Hidup	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Jumlah Peserta Bimbingan teknis Tata Cara Penerapan sanksi administrasi, penyelesaian sengketa, dan/atau penyidikan lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan		30 orang	-	30 orang	353.710.000,00	60 orang	353.710.000,00	Dinas Lingkungan Hidup	
		4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Peningkatan Pengelolaan Potensi Keanekaragaman Hayati Sulawesi Barat		4	-	4	1.400.000.000,00	8	1.400.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup	
		4.1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Jumlah kawasan pengelolaan keanekaragaman hayati yang dikelola Provinsi		5	-	5	1.400.000.000,00	10	1.400.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup	
			Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Profil Kehati		1 Dokumen Kehati	-	1 Dokumen Kehati	150.000.000,00	2 Dokumen Kehati	150.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup	
			Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah RTH yang dikelola		2 Lokasi	-	2 Lokasi	350.000.000,00	4 Lokasi	350.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup	
			Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Jumlah Demplot kehati		3 Demplot Kehati	-	3 Demplot Kehati	400.000.000,00	6 Demplot Kehati	400.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup	
			Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah peserta bimbingan teknis		150 Ok	-	150 Ok	150.000.000,00	300 Ok	150.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup	
			Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah sarana prasarana pengelolaan keanekaragaman hayati		3 sarana	-	3 sarana	350.000.000,00	6 Sarana Demplot Kehati	350.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup	

TUJUAN	SASARAN	Kode	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN OUTPUT	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2021		2022		TARGET SETELAH PERUBAHAN			
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	7	9	10	22	24	26	28	30	31	32	33
		5	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pj (Indeks Pencemar) yang memenuhi baku mutu	#####	67%	874.071.260,00	86%	2.700.000.000,00	86%	3.574.071.260,00	Dinas Lingkungan Hidup	
				Persentase kabupaten IKU diatas nilai 90		67%	135.220.860	83%	1.255.000.000	83%	1.390.220.860	Dinas Lingkungan Hidup	
				Cakupan Peningkatan Tutupan Lahan		30	382.299.604	40	2.500.000.000	40	2.882.299.604	Dinas Lingkungan Hidup	
		5.1	Pencengahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah titik pengujian yang memenuhi baku mutu kualitas udara ambien		16	135.220.860,00	20	705.000.000,00	20	840.220.860,00	Dinas Lingkungan Hidup	
				Persentase Parameter yang memenuhi baku mutu		78%	874.071.260,00	78%	2.700.000.000,00	78%	3.574.071.260,00	Dinas Lingkungan Hidup	
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah parameter dalam pemantauan kualitas lingkungan hidup		14	128.569.000,00	14	400.000.000,00	28	528.569.000,00	Dinas Lingkungan Hidup	
				Jumlah sungai yang ditingkatkan kualitasnya		3	36.000.650,00	3	500.000.000,00	6	536.000.650,00	Dinas Lingkungan Hidup	
				Jumlah usaha/kegiatan yang mengikuti PROPER		8	16.709.560,00	8	150.000.000,00	16	166.709.560,00	Dinas Lingkungan Hidup	
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah kampung iklim		7 Kampung Iklim	51.162.412,00	7 Kampung Iklim	450.000.000,00	14 Kampung Iklim	501.162.412,00	Dinas Lingkungan Hidup	
				Jumlah Laporan Inventarisasi GRK		Profil Emisi Persektor	84.058.448,00	Profil Emisi Persektor	255.000.000,00	2 Dokumen	339.058.448,00	Dinas Lingkungan Hidup	
				Persentase Peningkatan Bengkel/servis yang mendukung pengurangan bahan perusak ozon		50%	-	50%	350.000.000,00	2 Dokumen	350.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup	
			Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Uji yang tervalidasi		150 Dokumen	263.209.320,00	150 Dokumen	450.000.000,00				
				Jumlah ruang lingkup pengendalian mutu yang tervalidasi		30	279.104.730,00	30	300.000.000,00				
				Jumlah sarana prasarana pengujian laboratorium		40	66.460.000,00	40	650.000.000,00				
				Jumlah pengelola laboratorium yang ditingkatkan kapasitasnya		14	84.018.000,00	14	250.000.000,00				
		5.2	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Cakupan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		1	-	12	550.000.000,00	12	550.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup	

TUJUAN	SASARAN	Kode	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN OUTPUT	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2021		2022		TARGET SETELAH PERUBAHAN			
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	7	9	10	22	24	26	28	30	31	32	33
			Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah masyarakat yang menerima informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan LH			-	300 Dokumen	550,000,000.00	450 Dokumen	550,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup	
		5.3	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Luas kawasan Kerusakan Lahan yang dipulihkan kondisinya		30	382,299,604	40	2,500,000,000	70	2,882,299,604.00	Dinas Lingkungan Hidup	
				Cakupan titik pemantauan sumber pencemar									
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Luas wilayah yang direhabilitasi		4.3	382,299,604.00	25	1,000,000,000.00	29	1,382,299,604.00	Dinas Lingkungan Hidup	
				Jumlah Dokumen Pemetaan		2	-	2	600,000,000.00				
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Luas wilayah restorasi		10	-	15	600,000,000.00	25	600,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup	
				Jumlah Dokumen Pemetaan		1	-	1	300,000,000.00				
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah titik penghentian sumber pencemar									
		6	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase limbah B3 yang terkelola		1.13%	98,249,090.00	2.50%	1,000,000,000.00	2.50%	1,098,249,090.00	Dinas Lingkungan Hidup	
		6.1	Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah titik pengumpulan limbah B3		8	98,249,090.00	16	1,000,000,000.00	24	1,098,249,090.00	Dinas Lingkungan Hidup	
			Facilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah perusahaan pengumpul yang difasilitasi		1	-	1	500,000,000.00	2	500,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Limbah B3 yang dilaporkan		23,3513 ton	98,249,090.00	23,3513 ton	500,000,000.00	23,3513 ton	598,249,090.00	Dinas Lingkungan Hidup	
		7	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Penanganan Sampah		45%	330,365,740.00	55%	1,850,000,000.00	55%	2,180,365,740.00	Dinas Lingkungan Hidup	
		7.1	Penanganan Sampah di TPA/TPST regional	Volume timbulan sampah yang tertangani/terkelola		65923.66	330,365,740.00	65923.66	1,450,000,000.00	65923.66	1,780,365,740.00	Dinas Lingkungan Hidup	
				Jumlah sarana prasarana penanganan sampah TPA regional		1	-	1	400,000,000.00	2	400,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup	

TUJUAN	SASARAN	Kode	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN OUTPUT	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2021		2022		TARGET SETELAH PERUBAHAN			
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	7	9	10	22	24	26	28	30	31	32	33
			Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	Jumlah dokumen kebijakan Penanganan sampah regional		1	-	1	350,000,000.00	2	350,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST regional	Jumlah titik penanganan sampah TPA		4	-	4	400,000,000.00	8	400,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup	
				Jumlah peserta bimbingan teknis penanganan sampah		200 Ok	330,365,740.00	200 Ok	700,000,000.00	400	1,030,365,740.00	Dinas Lingkungan Hidup	
			Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah TPA regional yang ditetapkan		1	-	1	400,000,000.00	2	400,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup	
		8	PROGRAM PENGUKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	persentase MHA yang diakui		100%	-	100%	500,000,000.00	100%	500,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup	
		8.1	Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah MHA yang ditetapkan		1	-	1	300,000,000.00	2	300,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup	
			Koordinasi, sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah MHA teridentifikasi terkait PPLH		3	-	3	300,000,000.00	6	300,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup	
			Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Cakupan peningkatan kapasitas MHA dan Kearifan Lokal		3	-	3	200,000,000.00	6	200,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup	
			Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah peserta peningkatan kapasitas kelembagaan MHA dan Kearifan Lokal		300 Ok	-	300 Ok	200,000,000.00	600 Ok	200,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup	
		9	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Lembaga Masyarakat/Kelompok Peduli Lingkungan		100	241,481,880.00	100	1,100,000,000.00	100	1,341,481,880.00	Dinas Lingkungan Hidup	
		9.1	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah lembaga masyarakat/kelompok peduli lingkungan pilot project		3	241,481,880.00	3	1,100,000,000.00	6	1,341,481,880.00	Dinas Lingkungan Hidup	
			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Masyarakat	Jumlah peserta peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM Bid. Lingkungan Hidup untuk lembaga masyarakat		30	-	30	250,000,000.00	60	250,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup	

TUJUAN	SASARAN	Kode	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN OUTPUT	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2021		2022		TARGET SETELAH PERUBAHAN			
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	7	9	10	22	24	26	28	30	31	32	33
				Jumlah lembaga masyarakat/kelompok peduli lingkungan yang memperoleh peningkatan kapasitas PPLH		50 Orang	123.280.000,00	300 Orang		500 Orang	373.280.000,00	Dinas Lingkungan Hidup	
			Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah kader sakalpataru yang terlatih		4000	-	4000	250.000.000,00	8000 kader	250.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup	
				Jumlah sekolah peduli lingkungan		10 sekolah	118.201.880,00	15 sekolah	350.000.000,00	30 Sekolah	468.201.880,00	Dinas Lingkungan Hidup	
		10	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Cakupan penerima penghargaan lingkungan		10	51.455.630,00	11	450.000.000,00	21	501.455.630,00	Dinas Lingkungan Hidup	
		10.1	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kabupaten penerima penghargaan ADIPURA		1	48.555.630,00	1	150.000.000,00	2	198.555.630,00	Dinas Lingkungan Hidup	
				Jumlah penerima penghargaan Kalpataru tingkat Provinsi		1	2.900.000,00	2	300.000.000,00	3	302.900.000,00	Dinas Lingkungan Hidup	
			Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah titik persantauan ADIPURA		4	48.555.630,00	6	150.000.000,00	10	198.555.630,00	Dinas Lingkungan Hidup	
				Jumlah usulan penerima penghargaan Kalpataru tingkat Provinsi		5	-	5	150.000.000,00	10	150.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup	
				Jumlah penghargaan PPLH yang dibagikan pada peringatan HLH		4	2.900.000,00	4	150.000.000,00	16	152.900.000,00	Dinas Lingkungan Hidup	
		11	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat Dukungan Mutu Data Sektoral dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Lingkup OPD		4	74.161.220,00	4	430.000.000,00	4 Dokumen	722.988.220,00	Dinas Lingkungan Hidup	
				Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup DLH		62%	4.952.041.268,00	100%	6.127.975.685,00	100	11.042.696.953,00	Dinas Lingkungan Hidup	
				Nilai SAKIP OPD		80 Poin	109.413.500,00	82 Poin	109.413.500,00	82 Poin	218.827.000,00	Dinas Lingkungan Hidup	
				Persentase ASN dengan Deskripsi Pekerjaan yang Sesuai		72%	1.143.713.846,00	90%	3.692.159.508,00	9	1.738.683.100,00	Dinas Lingkungan Hidup	
		11.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Data Sektoral Lingkup OPD		90	183.574.720,00	90	539.413.500,00	180	722.988.220,00	Dinas Lingkungan Hidup	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun		2	74.161.220,00	2	50.000.000,00	4	124.161.220,00		
				Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah		4	-	4	75.000.000,00	8	75.000.000,00		
				Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah		4	-	4	75.000.000,00	8	75.000.000,00		
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD yang Tersusun		72	-	72	80.000.000,00	144	80.000.000,00		
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		6	-	6	50.000.000,00	12	50.000.000,00		
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD yang Tersusun		1	-	1	50.000.000,00	2	50.000.000,00		

TUJUAN	SASARAN	Kode	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN OUTPUT	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2021		2022		TARGET SETELAH PERUBAHAN			
						TARGET	Rp	TARGET	Rp		Rp		
1	2	3	7	9	10	22	24	26	28	30	31	32	33
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang Tersusun		1	-	1	50,000,000.00	2	50,000,000.00		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Tersusun		1	71,267,500.00	1	71,267,500.00	2	142,535,000.00		
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang Tersusun		1	38,146,000.00	1	38,146,000.00	2	76,292,000.00		
				Jumlah Data Sektoral yang Tersedia						0	-		
				Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						0	-		
		11.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup DLH		90%	4,912,536,268.00	90%	5,690,655,685.00	90%	10,603,191,953.00	Dinas Lingkungan Hidup	
				Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup DLH		90%	39,505,000.00	95%	400,000,000.00	95%	439,505,000.00		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Disediakan Gaji dan Tunjangannya		1	4,912,536,268.00	1	5,615,655,685.00	2	10,528,191,953.00		
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang Disediakan		6	-	6	75,000,000.00	12	75,000,000.00		
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Konsolidasi Keuangan		12	-	12	25,000,000.00	24	25,000,000.00		
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Keuangan Bulanan		12	-	12	75,000,000.00	24	75,000,000.00		
			Pengelolaan dan Penyisipan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang Dikelola dan Disiapkan		6	-	6	75,000,000.00	12	75,000,000.00		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang Tersusun		12	-	12	75,000,000.00	24	75,000,000.00		
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran		4	-	4	75,000,000.00	8	75,000,000.00		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir yang Tersusun		1	39,505,000.00	1	75,000,000.00	2	114,505,000.00		
		11.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Hasil Penatausahaan Barang Milik Daerah DLH yang tersedia			-		37,320,000.00				
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi Barang Milik Daerah SKPD			-						
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD			-	1 Dokumen	18,660,000.00				
			Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD			-	1 Dokumen	18,660,000.00				
		11.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Disiplin Aparatur Lingkup SKPD		90%	-	90%	246,250,000.00	90%	246,250,000.00		
				Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Lingkup SKPD		90%	124,040,000.00	90%	631,200,000.00	90%	755,240,000.00		
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang Diadakan		85	-	85	63,750,000.00	170	63,750,000.00		
				Jumlah Pakaian Kerja Lapangan yang Diadakan		85	-	85	63,750,000.00	170	63,750,000.00		
				Jumlah Pakaian Khusus yang Diadakan		85	-	85	63,750,000.00	170	63,750,000.00		

TUJUAN	SASARAN	Kode	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN OUTPUT	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2021		2022		TARGET SETELAH PERUBAHAN			
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	7	9	10	22	24	26	28	30	31	32	33
			Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		55	-	55	55,000,000.00	110	55,000,000.00		
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal		100%	124,040,000.00	100%	447,000,000.00	2	571,040,000.00		
			Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Persentase Keikutsertaan pada Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		55	-	55	89,600,000.00	110	89,600,000.00		
				Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		100%	-	100%	5,000,000.00	2	5,000,000.00		
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Persentase Keikutsertaan pada Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		55	-	55	89,600,000.00	110	89,600,000.00		
				Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan									
		11.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup DH		90%	587,767,428.00	90%	734,799,508.00	90%	-		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Jenis	10,000,000.00				
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan Kantor yang Disediakan									
				Jumlah Jenis Perlengkapan Kantor yang Disediakan									
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Jenis	8,100,000.00				
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		3 Jenis	26,897,000.00	3 Jenis	53,200,000.00				
				Jumlah Jenis Makanan yang Disediakan Jenis Cukup Jelas									
				Jumlah Jenis Minuman yang Disediakan									
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang yang Dicetak		10 Blok	4,435,100.00	30 Blok	13,305,300.00				
				Jumlah Jenis Barang yang Digandakan									
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan yang Disediakan			9,551,120.00	4 Bacaan	15,000,000.00				
				Jumlah Jenis Bahan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan									
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang Disediakan			45,481,240.00		54,481,240.00				
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi/Konsultasi Ke Luar Daerah		20 OP	236,433,388.00	25 OP	298,243,388.00				
				Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi/Konsultasi Ke Dalam Daerah		20 OP	264,969,580.00	25 OP	282,469,580.00				
		11.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia			66,395,550.00		996,000,000.00		-		
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang Diadakan				1 Unit	500,000,000.00				
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Diadakan				4 Unit	110,000,000.00				

TUJUAN	SASARAN	Kode	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN OUTPUT	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2021		2022		TARGET SETELAH PERUBAHAN			
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	7	9	10	22	24	26	28	30	31	32	33
			Pengadaan Mebel	Jumlah Jenis Mebeleur yang Diadakan			-	5 Jenis	104,000,000.00				
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan Gedung Kantor yang Diadakan		1 Jenis	54,104,550.00	3 Jenis	197,000,000.00				
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang Diadakan		1 Jenis	12,291,000.00	2 Jenis	85,000,000.00				
		11.7	Penyediaan Jasa Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan Jasa Ususan Pemerintahan		90%	154,407,768.00	90%	190,000,000.00	90%	-		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Surat Menyurat yang Dikelola		200 surat	77,130,000.00	200 surat	100,000,000.00				
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Tagihan yang Dibayarkan		36 Rekening/Bulan	77,277,768.00	36 Rekening/Bulan	90,000,000.00				
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Menggunakan Jasa/Pihak Ketiga			-						
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pengelolaan Administrasi Keuangan yang Menggunakan Jasa/Pihak Ketiga			-						
				Jumlah Pengelolaan Kebersihan Kantor yang Menggunakan Jasa/Pihak Ketiga			-						
				Jumlah Jenis Peralatan Kerja yang Mendapatkan Jasa Perbaikan			-						
		11.8	Pemeliharaan Barang Mlik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD		100%	211,103,100.00	100%	893,910,000.00		737,193,100.00		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Jenis Pemeliharaan Mobil Jabatan		6	136,670,000.00	6	156,670,000.00				
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Menggunakan Jasa Pemeliharaan		15	27,240,000.00	15	47,240,000.00				
				Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Memiliki Izin									
				Jumlah Jenis Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional									
			Pemeliharaan Mebel	Jumlah Jenis Mebeleur yang Mendapatkan Pemeliharaan		90%	-	95%	345,000,000.00	95%	345,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Pemeliharaan Gedung Kantor		250	-	250	95,000,000.00	500	95,000,000.00		
				Luas Gedung Kantor yang Direhabilitasi		36	-	36	120,000,000.00	72	120,000,000.00		
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor		12	14,170,000.00	12	30,000,000.00	24	44,170,000.00		
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor		21	33,023,100.00	21	100,000,000.00	42	133,023,100.00		
							8,851,565,118		27,619,418,193		36,240,489,986		

BAB VII
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH TERHADAP
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Adapun indikator kinerja perangkat daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan bidang urusan lingkungan hidup terangkum dalam Tabel 7.1. terdapat 24 indikator sebelum perubahan Dokumen Renstra (2017-2020) yang disesuaikan dengan indikator pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan 11 Indikator setelah perubahan Dokumen Renstras (2021-2022).

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis merupakan penjabaran dari Rencana Jangka Menengah Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022 yang menjadi Pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan oleh seluruh aparat Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulawesi Barat. Rencana Strategis (Renstra) ini disusun untuk periode pelaksanaan selama 5 tahun, yang menjadi arah dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat dan Rencana Kerja (RENJA) setiap tahunnya khususnya pada Tahun ke-5 dan Ke-6 yang mengalami beberapa perubahan kegiatan dan indikator kegiatan.

Pelaksanaan Renstra ini sangat diperlukan partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh aparatur DLH karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun, dengan demikian Renstra ini bukan hanya sebagai dokumen administrasi karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang ingin capai.

Semoga Perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat ini dapat diimplentasikan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*. Disadari bahwa penyusunan Perubahan Renstra ini masih terdapat berbagai kelemahan yang terkandung dalamnya, namun Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat berkomitmen mendukung sepenuhnya pencapaian visi Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2017 – 2022 serta mendukung pelaksanaan misi kelima tersebut yakni **“mengarustamakan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan”** berdasarkan tupoksi OPD yang dapat dijadikan pedoman dalam proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat.

L

A

M

P

I

R

A

N

PEMETAAN INDIKATOR

BSC	Renstra OPD				PK Eselon II		PK Eselon III			PK Eselon IV											
	Level	Kode Peta Strategi	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan									
Stakeholder Perspective (Tujuan)	Mewujudkan Kualitas Lingkungan Hidup	SS.0	Terwujudnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup	IKLHD (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah)															
				Indeks Kualitas Udara																	
Customer Perspective (Sasaran)	Meningkatnya Kualitas Air dan Udara	SS.1	Meningkatnya Kualitas Air dan Udara	Indeks Kualitas Air	Meningkatnya Kualitas Air dan Udara	Indeks Kualitas Air															
				Indeks Kualitas Udara																	
	Meningkatnya Kualitas Wilayah Pesisir, Penanganan Lahan Kritis dan Sumber-sumber Air	SS.2	Meningkatnya Kualitas Wilayah Pesisir, Penanganan Lahan Kritis dan Sumber-sumber Air	Persentase Peningkatan Tutupan Lahan	Meningkatnya Kualitas Wilayah Pesisir, Penanganan Lahan Kritis dan Sumber-sumber Air	Persentase Peningkatan Tutupan Lahan															
Internal Process Perspective (Bidang)	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	SS.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	Tersedianya Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Tersusunnya dokumen pengendalian RPPLH	Cakupan dokumen Pengendalian RPPLH yang tersusun	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Terlaksananya penyusunan dokumen pengendalian RPPLH Provinsi	Jumlah DIKLPH dan IKLH Provinsi Sulawesi Barat									
																	Jumlah Dokumen Neraca Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat				
																	Jumlah Dokumen PDRB Hijau Provinsi Sulawesi Barat				
																	Jumlah dokumen Perencanaan dan pengkajian dampak lingkungan yang bermutu				
																Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Tersedia dokumen KLHS Provinsi	Jumlah Dokumen KLHS yang dikaji oleh provinsi	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Tersusunnya dokumen KLHS provinsi	Jumlah KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi tersusun
																				Tervalidasinya dokumen KLHS RPJPD/RPJMD kabupaten	Jumlah KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten yang Divalidasi
																			Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan dampak/Risiko Lingkungan Hidup	Tervalidasinya Dokumen KLHS	Jumlah KLHS yang divalidasi
Internal Process Perspective (Bidang)	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	SS.4	Meningkatnya ketaatan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH	Persentase Ketaatan Izin Lingkungan dan Izin PPLH	Meningkatnya ketaatan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH	Persentase Ketaatan Izin Lingkungan dan Izin PPLH	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya pengawasan izin lingkungan dan izin PPLH	Jumlah Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang dilaksanakan	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Terfasilitasinya pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin PPLH dan/atau izin PPLH	Jumlah penanggungjawab usaha/kegiatan yang taat terhadap ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH									
									Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Terlaksananya bimbingan teknis pengawasan lingkungan hidup	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Pengawasan Lingkungan Hidup										
									Pengawasan usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksanakannya pengawasan usaha/kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLHnya diterbitkan oleh Provinsi	Jumlah usahadan/atau kegiatan yang wajib diawasi oleh pemerintah Provinsi										

BSC	Renstra OPD				PK Eselon II		PK Eselon III			PK Eselon IV																
	Level	Kode Peta Strategi	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan														
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	SS.5	Terfasilitasinya penanganan pengaduan lingkungan hidup	Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan	Terfasilitasinya penanganan pengaduan lingkungan hidup	Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan	Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Tersebaikannya pengaduan masyarakat di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Jumlah Pengaduan yang tertangani	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Terlaksananya Pos Pengelolaan dan penerimaan pengaduan	Jumlah pengaduan lingkungan yang diterima														
													Terlaksananya bimbingan teknis tata cara pengelolaan pengaduan masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Masyarakat												
															Kordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Terlaksananya Bimbingan teknis Tata Cara Penerapan sanksi administrasi, penyelesaian sengketa, dan/atau penyidikan lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan	Jumlah Peserta Bimbingan teknis Tata Cara Penerapan sanksi administrasi, penyelesaian sengketa, dan/atau penyidikan lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan									
																		Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	Tersusunnya Dokumen Profil Kehati	Jumlah Dokumen Profil Kehati						
																					Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Tersedianya dan terkelolanya Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah RTH yang terkelola			
																								Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati Lainnya	Tebentuknya dempot kehati	Jumlah Demplot kehati
Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati	Tersedianya sarana prasarana pengelolaan keaneekaragaman hayati	Jumlah sarana prasarana pengelolaan keaneekaragaman hayati																								
			Kordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Terbentuknya kampung iklim	Jumlah kampung iklim																					
						Kordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Meningkatnya bengkel/servis yang mendukung pengurangan bahan perusak ozon	Persentase Peningkatan bengkel/servis yang mendukung pengurangan bahan perusak ozon																		
									Terlaksananya pemantauan kualitas lingkungan hidup	Jumlah parameter dalam pemantauan kualitas lingkungan hidup																
											Terlaksananya peningkatan kualitas sungai	Jumlah sungai yang ditingkatkan kualitasnya														
													Terlaksananya verifikasi dan inspeksi perusahaan yang mengikuti PROPER	Jumlah usaha/kegiatan yang mengikuti PROPER												
															Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Tervalidasinya laporan hasil uji	Jumlah Laporan Hasil Uji yang tervalidasi									
Internal Process Perspective (Bidang)	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	SS.7																Terkendalinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase Pij (Indeks Pencemar) yang Memenuhi Baku Mutu	Terkendalinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase Pij (Indeks Pencemar) yang Memenuhi Baku Mutu	Pencegahan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Terkendalinya parameter yang memenuhi baku mutu lingkungan	Jumlah titik pengujian yang memenuhi baku mutu kualitas udara ambien	Kordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Terbentuknya kampung iklim
			Persentase Parameter yang memenuhi baku mutu	Kordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Meningkatnya bengkel/servis yang mendukung pengurangan bahan perusak ozon																					
						Terlaksananya pemantauan kualitas lingkungan hidup	Jumlah parameter dalam pemantauan kualitas lingkungan hidup																			
								Terlaksananya peningkatan kualitas sungai	Jumlah sungai yang ditingkatkan kualitasnya																	
										Terlaksananya verifikasi dan inspeksi perusahaan yang mengikuti PROPER	Jumlah usaha/kegiatan yang mengikuti PROPER															
												Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Tervalidasinya laporan hasil uji	Jumlah Laporan Hasil Uji yang tervalidasi												

BSC	Renstra OPD				PK Eselon II		PK Eselon III			PK Eselon IV		
	Level	Kode Peta Strategi	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
											Tersedianya sarana dan prasarana pengujian laboratorium	Jumlah sarana prasarana pengujian laboratorium
											Terlaksananya dan tervalidasinya pengendalian mutu pengujian laboratorium	Jumlah ruang lingkup pengendalian mutu yang tervalidasi
											Terlaksananya peningkatan kapasitas pengelola laboratorium	Jumlah pengelola laboratorium yang ditingkatkan kapasitasnya
				Persentase Kabupaten IKU Diatas Nilai 90	Terkendalinya indeks kualitas udara	Persentase Kabupaten IKU Diatas Nilai 90	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Terlaksananya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Cakupan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pemberian Informasi Peringatan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Terlaksananya pemberian informasi kepada masyarakat	Jumlah masyarakat yang menerima informasi peringatan pencemaran dan atau kerusakan LH
				Cakupan Peningkatan Tutupan Lahan	Meningkatnya tutupan lahan	Cakupan Peningkatan Tutupan Lahan	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Terlaksananya pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Luas kawasan Kerusakan Lahan yang dipulihkan kondisinya	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Terlaksananya koordinasi dan rehabilitasi kerusakan lahan kritis dan pesisir	Luas wilayah yang direhabilitasi
											Tersusunnya dokumen pemetaan lahan kritis dan pesisir	Jumlah Dokumen Pemetaan
										Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Terlaksananya koordinasi dan restorasi kerusakan lahan	Luas wilayah restorasi
										Tersusunnya dokumen pemetaan kerusakan lahan	Jumlah Dokumen Pemetaan	
Internal Process Perspective (Bidang)	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	SS.8	Terkendalinya bahan berbahaya beracun (B3) dan Limbah Bahan berbahaya dan beracun (LB3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	Terkendalinya bahan berbahaya beracun (B3) dan Limbah Bahan berbahaya dan beracun (LB3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya pengelolaan Limbah B3 melalui Pengumpulan Limbah B3	Jumlah titik pengumpulan limbah B3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Terlaksananya koordinasi dan pengelolaan Limbah B3	Jumlah Limbah B3 yang terkelola
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	SS.9	Meningkatnya penanganan sampah	Persentase Penanganan Sampah	Meningkatnya penanganan sampah	Persentase Penanganan Sampah	Penanganan Sampah di TPA/TPST regional	Terlaksananya penanganan sampah di TPA	Volume timbulan sampah yang tertangani/terkelola	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	Tersusunnya kebijakan penanganan sampah	Jumlah dokumen kebijakan Penanganan sampah
								Tersedianya sarana prasarana penanganan sampah di TPA	Jumlah sarana prasarana penanganan sampah TPA	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST regional	Terlaksananya koordinasi penanganan sampah di TPA	Jumlah titik penanganan sampah TPA
											Terlaksananya bimbingan teknis penanganan sampah	Jumlah peserta bimbingan teknis penanganan sampah
	PROGRAM PENGUKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	SS.10	Terfasilitasinya pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA) dan kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang Diakui	Terfasilitasinya pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA) dan kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang Diakui	Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Terlaksananya pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah MHA yang diakui	Koordinasi, sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Terlaksananya identifikasi MHA terkait PPLH	Jumlah MHA teridentifikasi terkait PPLH
Internal Process Perspective (Bidang)	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	SS.11	Meningkatnya lembaga masyarakat/kelompok peduli lingkungan	Persentase Peningkatan Lembaga Masyarakat/Kelompok Peduli Lingkungan	Meningkatnya lembaga masyarakat/kelompok peduli lingkungan	Persentase Peningkatan Lembaga Masyarakat/Kelompok Peduli Lingkungan	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi	Terselenggaranya pendidikan, pelatihan dan penyuluhan Lingkungan hidup terhadap lembaga kemasyarakatan	Jumlah lembaga masyarakat/kelompok peduli lingkungan pilot project	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM Bid. Lingkungan Hidup untuk lembaga kemasyarakatan	Jumlah peserta peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM Bid. Lingkungan Hidup untuk lembaga kemasyarakatan
											Terlaksananya peningkatan kapasitas PPLH terhadap lembaga masyarakat/kelompok peduli lingkungan	Jumlah lembaga masyarakat/kelompok peduli lingkungan yang memperoleh peningkatan kapasitas PPLH

BSC	Renstra OPD				PK Eselon II		PK Eselon III			PK Eselon IV		
	Level	Kode Peta Strategi	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
										Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Terlaksananya pendampingan gerakan peduli lingkungan hidup dan kader sakakalpataru	Jumlah kader sakakalpataru yang terlatih
											Terbentuknya sekolah peduli lingkungan	Jumlah sekolah peduli lingkungan
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	SS.12	Meningkatnya penerima penghargaan lingkungan	Cakupan Penerima Penghargaan Lingkungan	Meningkatnya penerima penghargaan lingkungan	Cakupan Penerima Penghargaan Lingkungan	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya penilaian kota ADIPURA	Jumlah Kabupaten penerima penghargaan ADIPURA	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Terlaksananya pemantauan ADIPURA	Jumlah titik pemantauan ADIPURA
								Terlaksananya penilaian penerima penghargaan Kalpataru Tk. Provinsi	Jumlah penerima penghargaan Kalpataru tingkat Provinsi		Terlaksananya verifikasi penerima penghargaan kalpataru	Jumlah usulan penerima penghargaan Kalpataru tingkat Provinsi
											Terlaksananya pemberian penghargaan PPLH pada peringatan HLH	Jumlah penghargaan PPLH yang dibagikan pada peringatan HLH
Learning & Growth Perspective (Sekretariat)	Human Capital											
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SS.13	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Aparatur Lingkup DLH	Persentase ASN dengan Deskripsi Pekerjaan yang Sesuai	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Aparatur Lingkup DLH	Persentase ASN dengan Deskripsi Pekerjaan yang Sesuai	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terwujudnya Sumber Daya Aparatur yang Berkapasitas dan Disiplin Lingkup DLH	Tingkat Disiplin Aparatur Lingkup DLH	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang Diadakan
											Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah Pakaian Kerja Lapangan yang Diadakan
											Pakaian Khusus	Jumlah Pakaian Khusus yang Diadakan
									Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Lingkup DLH	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Tersusunnya Laporan Hasil Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
										Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah PNS yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal
										Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Persentase Keikutsertaan pada Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
											Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
										Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Persentase Keikutsertaan pada Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
											Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya BMD Penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	Persentase BMD Penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Mobil Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang Diadakan
										Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Diadakan
										Pengadaan Mebel	Tersedianya Jenis Mebeleur	Jumlah Jenis Mebeleur yang Diadakan

BSC	Renstra OPD				PK Eselon II		PK Eselon III			PK Eselon IV		
	Level	Kode Peta Strategi	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SS.14	Meningkatnya Pengelolaan Tata Laksana Lingkup DLH	Tingkat Dukungan Mutu Data Sektoral dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Lingkup OPD	Meningkatnya Pengelolaan Tata Laksana Lingkup DLH	Tingkat Dukungan Mutu Data Sektoral dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Lingkup OPD	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Akuntabel Lingkup DLH	Persentase Ketersediaan Data Sektoral Lingkup OPD	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun
											Tersusunnya Dokumen Hasil Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
											Tersusunnya Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
										Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang Tersusun
										Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang Tersusun
										Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang Tersusun
										Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang Tersusun
										Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Tersusun
										Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang Tersusun
											Tersedianya Data Sektoral	Jumlah Data Sektoral yang Tersedia
											Tersusunnya Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
							Administrasi Umum	Terkelolanya Administrasi Umum Lingkup DLH	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup DLH	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Teersedianya Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
										Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan Kantor yang Disediakan
											Tersedianya Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Perlengkapan Kantor yang Disediakan
										Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
										Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
											Tersedianya Makanan	Jumlah Jenis Makanan yang Disediakan Jenis Cukup Jelas
											Tersedianya Minuman	Jumlah Jenis Minuman yang Disediakan
										Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan	Jumlah Jenis Barang yang Dicitak
											Tertaksananya pengadaan barang	Jumlah Jenis Barang yang Digandakan



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2021